



PENAJAM SELARASKAN KAWASAN PESISIR-PELABUHAN DEMI IKON DAERAH



PJ BUPATI PPU SIAP BERI SANKSI ASN
YANG TERLIBAT POLITIK PRAKTIS



Pelabuhan penyeberangan kapal kayu bakal ditata dan dibangun anjungan yang akan menjadi ikon Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)

PENAJAM SELARASKAN KAWASAN PESISIR-PELABUHAN DEMI IKON DAERAH

PPU - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menyelaraskan penataan kawasan pesisir dan pelabuhan untuk membangun ikon khas daerah berjuluk Benuo Taka itu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Penajam Paser Utara Rivana Noor, di Penajam, Senin, mengatakan penataan kawasan pesisir itu punya tujuan utama yaitu mempercantik wajah kabupaten tetangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Selain kawasan pesisir, Kabupaten Penajam juga akan menata pelabuhan penyeberangan kapal cepat (speedboat) dan kapal kayu (klotok) dengan pembangunan anjungan.

Rivana mengatakan pembangunan anjungan tersebut akan berdampak pada kerapian, hingga keamanan dan kenyamanan pengunjung di pelabuhan.

"Kami akan selaraskan terlebih dahulu antara penataan pelabuhan dan penataan pesisir," jelasnya.

Pembangunan anjungan itu, menurut Rivana, dilakukan dengan mempertahankan dan menata permukiman warga jika tidak ada relokasi untuk masyarakat yang bermukim di sekitar pelabuhan.

Rivana mengatakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan mencari solusi bagi warga yang terdampak pembangunan anjungan di pelabuhan penyeberangan kapal cepat dan kapal kayu itu.

Sejumlah pilihan akan yang akan ditawarkan kepada masyarakat antara lain ganti rugi lahan dan bangunan hingga relokasi atau penataan permukiman.

Lokasi perencanaan pembangunan anjungan sebagian lahan milik warga dan kawasan permukiman masyarakat, serta terdapat tempat usaha warga seperti seperti penitipan sepeda motor dan lainnya, demikian Rivana Noor.

Oleh : Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor : Imam Santoso



Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Pj Bupati PPU Makmur Marbun dalam acara sosialisasi. (Humas Setkab PPU for MediaKaltimGroup)

SOSIALISASI PENTINGNYA DATA DESA PRESISI, PPU JADI PILOT PROJECT PENERAPAN

PPU - Sebagai upaya memperluas Data Desa Presisi (DDP) di Penajam Paser Utara (PPU), Pemkab PPU adakan sosialisasi. Turu dihadiri Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang juga selaku Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan ucapan terima kasih atas nama pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara atas kehadiran mereka. Dalam kegiatan itu pula, melibatkan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB sekaligus sebagai Wakil Kepala LPPM IPB, Dr Sofyan Sjaf bersama tim.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik beserta Jajarannya dan seluruh Tim Institut Pertanian Bogor (IPB University) di Serambi Nusantara, Kabupaten PPU." ucapnya, Senin (23/10/2023).

Marbun menjelaskan sosialisasi ini melibatkan seluruh unsur pemerintahan. Baik pemerintah daerah, hingga para kecamatan, kelurahan hingga pemerintah desa.

"Penggunaan Data Desa Presisi sangat penting dalam upaya menghadirkan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual daerah. sehingga dapat memberikan input yang valid dan terukur, terutama berkaitan

dengan informasi luas daerah, batasan wilayah, topografi wilayah, potensi wilayah sampai dengan status penduduk," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa penggunaan Data Desa Presisi ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden 39/2019 Tentang Satu Data Indonesia. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri 12/2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, Profil Desa dan Kelurahan.

Hal ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati PPU 37/2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di PPU. "Data Desa Presisi akan sangat bermanfaat untuk kita semua sehingga membantu percepatan pembangunan dan berbagai program di Kabupaten PPU, apalagi kita merupakan Serambi Nusantara, kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin," harapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat membuka sosialisasi DPP juga menyampaikan bahwa PPU akan menjadi pilot project pertama di wilayah Kalimantan.

"Kuncinya, penyelenggaraan pemerintah daerah harus berbasis data presisi. Perencanaan pembangunan tidak harus proyek besar lho. Sekalipun bermula dari hal kecil, bila sukses kita lakukan, pasti akan berdampak nyata bagi masyarakat," pungkas Akmal. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memimpin apel pagi, Senin (23/10/2023). (Humas Setkab PPU for Media Kaltim Group)

PJ BUPATI PPU SIAP BERI SANKSI ASN YANG TERLIBAT POLITIK PRAKTIS

PPU - Memasuki tahun politik, Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun kembali menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus profesional dan netral. Khususnya dalam memasuki tahun politik, agar tidak terlibat dalam dunia politik praktis.

Jika diketahui ada ASN terbukti terlibat dalam politik praktis akan mengambil tindakan tegas kepada ASN yang bersangkutan. "Tidak ada urusan politik disini. Saya ingatkan itu. Kita disini hanya bekerja, bekerja dan bekerja. Saya akan ambil tindakan tegas jika ada ASN di PPU yang terbukti terlibat dalam politik," katanya saat memimpin apel pagi di lingkungan Setkab PPU, Senin, (23/10/2023).

Ia juga mengatakan bahwa Pemilu mendatang, ASN harus menjaga netralitas dan memegang teguh kode etik kepegawaian. ASN di lingkungan Pemkab PPU harus turut

serta menyukseskan jalannya pemilihan umum (Pemilu).

Dengan tidak terlibat dalam mengkampanyekan bakal calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis atau memperlihatkan keberpihakannya terhadap salah satu calon.

"Warga PPU membutuhkan ASN yang profesional dan netral. Saya tidak segan-segan memberikan sanksi apabila ada yang melanggar kode etik ASN," tambahnya.

Lebih lanjut, Makmur meminta seluruh ASN khususnya di PPU untuk tetap fokus terhadap pelayanan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. "Setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas serta pelayanan yang berkualitas," pungkasnya. **(ADV/SBK)**



Kepala Disdikpora PPU, Alimuddin dalam pembukaan acara KDS Senin (23/10/2023) kemarin. (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

PPU JADI TUN RUMAH KEMAH DEWAN SAKA KALTIM 2023

PPU - Penajam paser Utara (PPU) tahun ini mendapat kesempatan Kemah Dewan Saka (KDS) tingkat Kalimantan Timur (Kaltim). Kegiatan kemah 5 hari ini digelar di lapangan Bumi Perkemahan Benuo Taka, Kecamatan Babulu, Senin, (23/10/2023).

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin mengatakan KDS merupakan konsolidasi organisasi koordinator wilayah (korwil) kepramukaan dari cabang se-kabupaten/kota Kaltim. Dalam rangka pembekalan terhadap satuan karya (saka) Pramuka.

"Juga sebagai tempat mengembangkan keilmuan, keterampilan, dan membangun karakter sehingga kedepannya dapat menjadi trampil dan mandiri," ungkapnya, Selasa (24/10/2023).

Lanjutnya, ia menegaskan untuk para peserta agar dapat menanamkan jiwa semangat

berlatih dalam kepramukaan. Karena banyak memberi dampak positif terhadap kepribadian sendiri serta dapat memberi kontribusi terhadap pemerintah daerah.

"Semoga KDS di Kabupaten PPU dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai apa yang diinginkan bersama," ucap Alimuddin.

Sementara itu, Plh Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten PPU Sudirman menyebutkan kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari. Dimulai dari tanggal 23 Oktober 2023 hingga 27 Oktober 2023.

Ia berharap, ke depannya KDS semakin lebih baik juga lebih besar lagi. Sehingga dapat melahirkan generasi bangsa yang mampu memimpin kabupaten/kotanya masing-masing.

"Harapannya melalui KDS ini yang kita bina akan lahir pemimpin yang baru nantinya yang memiliki karakter dan kepribadian yang lebih baik lagi," tutupnya. (ADV/SBK)



Momentum pelepas atlet SOIna oleh Disdikpora PPU. (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU LEPAS 21 ATLET DISABILITAS KE AJANG SOINA 2023 DI TENGGARONG

PPU - Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN Penajam Paser Utara (PPU) tahun ini mengikuti Pekan Spesial Olahraga Daerah (Pesoda)/Special Olympic Indonesia (SOIna). Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin melepas langsung para atlet tersebut untuk bertanding dalam ajang yang diadakan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Selasa (24/10/2023).

Ajang SOIna ini merupakan tempat berkumpulnya bagi penyandang disabilitas. Para tuna grahita untuk melakukan unjuk kebolehan sesuai dengan kemampuan yang di miliki di bidang olahraga dan seni, seperti manusia normal pada umumnya.

Ketua SOIna PPU yang juga Kepala SLBN PPU Khofni menyampaikan telah mengirimkan 21 atletnya, 7 pelatih, 7 official dan 7 manajer. SOIna di Tenggarong ini mulai dilaksanakan sejak 24 hingga 27 Oktober 2023,

"Selaku pengurus SOIna, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua donatur yang sudah membantu, semoga Allah SWT memberikan kelimpahan berkah dan kesuksesan," ujarnya.

Sementara Kepala Disdikpora PPU, Alimuddin memberikan semangat ke pada semua atlet yang berkompetisi di beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan. Ia juga

mengingatkan kepada orang tua pendamping, official agar anak-anak selalu dalam pengawasan yang ekstra.

"Anak-anak harus tetap dalam pengawasan khusus agar tiba dengan selamat dan segera beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada," terangnya.

Alimuddin mengungkapkan Disdikpora PPU juga akan memberikan dukungan bantuan dalam kegiatan ini. Hal itu akan disalurkan setelah penyusunan anggaran akhir tahun ini rampung dilakukan.

"Yang terpenting anak-anak kita bisa berkiprah di Tenggarong untuk kegiatan keolahragaan," tegasnya.

Ia berharap ke depannya SLBN ke depannya dapat semakin memperkuat sinergitas dengan Pemkab PPU. Dalam upaya memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

"Karena itu tugas dan tanggung jawab Kita, dan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada anak -anak Kita," ungkapnya.

Oleh karena itu, para penyandang disabilitas di PPU agar tetap semangat dalam meraih prestasi. "Yakin dan percaya pemerintah daerah akan memperhatikan," pungkas Alimuddin. **(ADV/SBK)**



Ketua TP PKK PPU Linda Romali Siregar Sambut saat menerima kunjungan TP PKK Pusat, Selasa (24/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

TP PKK PUSAT TRI SUSWATI TITO KARNAVIAN KUNJUNGAN KE PPU TINJAU PEMBANGUNAN IKN

PPU - Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian didampingi Ketua TP PKK Kaltim Yulia Zubir Akmal tiba di Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (24/10/2023). Pada kunjungan tersebut, Pj Bupati PPU Makmur Marbun bersama Ketua Tim Pengerak PKK PPU, Linda Romali Siregar beserta jajaran pengurus PKK Kabupaten PPU menyambut kunjungan khusus tersebut.

"Selamat datang di Kabupaten Penajam Paser Utara Ketua TP PKK Pusat beserta Jajaran dan TP PKK Prov. Kaltim di wilayah Kabupaten PPU dan khususnya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tepatnya di Kecamatan Sepaku," ucap Makmur.

Usai berada di pelabuhan IHM, rombongan kemudian meninjau langsung sejumlah kawasan penggebangan IKN Nusantara. Kunjungan pertamanya ialah Titik Nol IKN.

Kemudian bergerak menuju sumbu ke-

bangsaan yang saat ini terdapat sejumlah pembangunan inti IKN yang terus dalam pengerjaan. Baik Istana Negara, Gedung-Gedung Kementerian termasuk kawasan yang akan dijadikan Upacara Nasional 17 Agustus di Tahun 2024 Mendatang.

Selanjutnya ke Rumah Teknologi yang membawa para pengunjung dapat merasakan berada dalam IKN. Yang dibuat dalam pengembangan visualisasi teknologi yang betul-betul membawa para pengunjung serasa nyata dalam IKN di masa mendatang.

Tri Suswati Tito Karnavian saat melihat sejumlah progres pembangunan IKN menyampaikan apresiasinya. "Sungguh luar biasa, progresnya begitu cepat, semoga terus berjalan lancar, kita panjang umur dapat merasakan nuansa IKN dimasa yang akan datang dalam sejarah bangsa Indonesia," tutupnya. (ADV/SBK)



Pelaksanaan sosialisasi SP4N-LAPOR! di Kecamatan Sepaku, Senin (23/10/2023). (Diskominfo PPU for MediaKaltimGroup)

DISKOMINFO PPU TUNTASKAN SOSIALISASI SP4N-LAPOR! DI KECAMATAN SEPAKU

PPU - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Paser Utara (PPU) menuntaskan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) ke seluruh kelurahan/desa di PPU. Terakhir, seluruh kelurahan/desa di Kecamatan Sepaku menjadi tempat terakhir pelaksanaan sosialisasi, Senin (23/10/2023).

Adapun kegiatan bertemakan SP4N-LAPOR! sebagai Kanal Pengaduan warga ini disampaikan langsung arasumber dari Diskominfo PPU Roinald Pagayang. Ia menjelaskan lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah KemenPAN-RB sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP).

“Sebagai Pengawas Program

Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik,” ujarnya.

SP4N LAPOR! adalah pengelolaan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan pelayanan publik. Yang dilaksanakan secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik masyarakat.

Sosialisasi ini bertujuan tidak hanya untuk memperkenalkan aplikasi SP4N-LAPOR!. Tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat dengan literasi media dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

Pemkab PPU melalui Diskominfo PPU dalam hal ini berkomitmen tinggi dalam melaksanakan tindak lanjut perbaikan

dari KemenPAN-RB ini. Dengan menjalankan rencana aksi dalam rangka percepatan pengelolaan pengaduan.

Menurutnya, aplikasi ini telah menjadi bagian penting dari upaya untuk memotong birokrasi dan mempercepat penyelesaian masalah di instansi pelayanan publik. Yang lebih penting lagi, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya, menciptakan lingkungan yang aman bagi warga yang ingin melaporkan masalah seperti penyimpangan dana di desa atau kejanggalan dalam pelayanan publik.

“Sosialisasi berjalan dengan baik dan lancar seperti biasa di akhir kegiatan diselingi dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta,” pungkas Ronald. (ADV/SBK)



Pj Bupati PPU Makmur Marbun bersama Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor saat menandatangani berita acara rapat paripurna, Selasa (24/10/2023). (Robbi/MediaKaltimGroup)

PEMKAB PPU DORONG RAPERDA PAJAK DAN RETRIBUSI SEGERA DISAHKAN

PPU - Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menghadiri rapat paripurna Selasa (24/10/2023) bertempat di Gedung Paripurna DPRD PPU. Dalam agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD PPU terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Makmur mengatakan adanya pembahasan raperda ini merupakan hasil pembahasan bersama yang sinergis antara pemerintah daerah dan DPRD PPU. "Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah saya mendorong sehingga Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat terselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan pentingnya raperda pajak dan retribusi daerah tersebut menjadi perda. Regulasi ini nantinya akan menjadi dasar hukum yang memayun-

gi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah daerah.

Tentu akan berfungsi juga sebagai pedoman atau norma hukum yang baru di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Yakni memperbaharui Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,.

"Raperda ini menjadi regulasi tunggal yang akan menggantikan seluruh perda di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelumnya," sebut Makmur.

Makmur menerangkan jika raperda ini merupakan regulasi baru yang lahir berdasarkan Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Aturan ini juga yang telah mencabut Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah pusat telah melakukan restrukturisasi jenis

pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan dan rasionalisasi jenis dan jumlah retribusi. Walaupun tetap mempertahankan nomenklatur klasifikasi dalam 3 (tiga) jenis retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Dengan demikian, perda ini diharapkan akan memberikan landasan hukum baru bagi Pemkab PPU dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Yang akan dimulai pada 2024 dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha di PPU.

"Sekaligus akan dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten PPU," tutupnya.

(ADV/SBK)



PENGEMBANGAN PERTANIAN BERBASIS PERTANIAN ALA KUKAR DIPUJI PJ GUBERNUR KALTIM



**JELANG PERPINDAHAN IKN, KECAMATAN
SAMBOJA TERUS LAKUKAN PENDATAAN
ASET STRATEGIS KUKAR**



Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik (kiri) saat bersama Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Istimewa)

PENGEMBANGAN PERTANIAN BERBASIS PERTANIAN ALA KUKAR DIPUJI PJ GUBERNUR KALTIM

TENGGARONG - Ide brilian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), dalam membangun sektor pertanian berbasis kawasan, menuai pujian dari Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik.

Pujian terhadap konsep pertanian yang sedang dibangun Pemkab Kukar ini, dilontarkan saat Akmal menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan pertanian, di Hotel Platinum Balikpapan, Senin (23/10/2023) malam.

Ia mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada Pemkab Kukar dalam upaya pengembangan pembangunan pertanian dalam arti luas. Ia juga antusias untuk mengetahui langkah-langkah integrasi yang telah dilakukan.

Bahkan, Akmal Malik menginginkan, agar semua daerah mitra maupun penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menggagas dan melakukan terobosan pembangunan pertanian. Seperti yang telah dilakukan oleh Kukar.

"Saya sangat mengapresiasi Pak Bupati. Saya melihat ada semangat dan spirit di Kukar ini," ujarnya.

Pujian setinggi langit ini pun membawa kebanggaan tersendiri bagi Bupati Kukar, Edi Damansyah. Dengan penuh rasa bangga, ia menjelaskan bahwa program pembangunan pertanian berbasis kawasan telah menjadi fokus Pemkab Kukar. Bersama dengan pembangunan sektor pariwisata dan

ekonomi kreatif.

Kukar membangun kawasan pertanian kedalam 5 kawasan yang telah ditetapkan. Masing-masing kawasan ditetapkan sebagai fokus pengembangan kawasan tersebut, mulai dari pengembangan padi sawah, tanaman hortikultura, peternakan, dan perikanan yang tumbuh berjalan beriringan dalam satu kawasan.

Lima kawasan tersebut di antaranya, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Sebulu-Muara Kaman, Kecamatan Tenggarong-Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang I dan Kecamatan Tenggarong Seberang II.

"Kami ingin mendorong optimalisasi peningkatan produktifitas dengan melengkapi infrastruktur tani seperti jalan usaha tani, irigasi embung, alsintan dan pengembangan SDM," sebut Edi.

Edi juga berharap, upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kukar dapat meningkatkan produktivitas petani. Dari yang sebelumnya hanya dua kali panen kini bisa menjadi tiga kali panen dalam satu tahun.

"Saya juga berharap gubernur bisa support pembangunan pertanian terintegrasi berbasis kawasan. Apabila terdapat alsintan yang kurang, kemudian bisa ditambah oleh pemerintah provinsi. Kira-kira begitu," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Camat Samboja, Damsik. (Ady/Wahyudi)

Jelang Perpindahan IKN, Kecamatan Samboja Terus Lakukan Pendataan Aset Strategis Kukar

TENGGARONG - Jelang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), mengakibatkan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masuk ke dalam wilayahnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, pun terus melakukan pendataan sejumlah aset Kukar yang menjadi bagian dari IKN.

Salah satunya Kecamatan Samboja. Camat Samboja, Damsik, mengatakan pihaknya berkerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Kukar. Untuk melakukan pendataan aset-aset yang dimiliki Kukar di wilayah Kecamatan Samboja.

"Kami kembali melakukan pendataan aset yang ada di Samboja, sebenarnya aset-aset

tersebut sudah lama didata," kata Damsik, Selasa (24/10/2023). Termasuk Pertamina yang masuk ke wilayah Samboja, mengingat memang menjadi salah satu wilayah menghasilkan migas di Kukar.

Terkait soal nasib sejumlah aset yang dimiliki Kukar tersebut, Damsik mengaku sampai saat ini belum tahu, bagaimana kelangsungan peralihan aset strategis daerah ini. "Kalau masalah ambil alih, sesuai dengan Unsang-Undang Nomor 3 tahun 2022 sebenarnya itu sudah masuk ke IKN semua. Cuman sampai hari ini, dari Badan Otorita IKN sendiri belum ada kepastian seperti apa proses pengalihannya," pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Editor : Muhammad Rafi'i



Kasi Kesra Desa Jonggon Jaya, Teguh Wiyono. (Ady/Radar Kukar)

Pemdes Jonggon Jaya Bantu Proses Distribusi Bantuan Pangan untuk PKH

TENGGARONG - Pemerintah Desa (Pemdes) Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, membantu proses distribusi bantuan pangan dari Bulog. Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Sebanyak 20 penerima manfaat di Desa Jonggon Jaya yang terdata, dan bantuan ini telah disalurkan secara rutin selama empat bulan terakhir.

"Beras ini kita bantu distribusikan ke penerima manfaat, diantar kesini oleh pihak Bulog langsung dan kita bantu salurkan," kata Kasi Kesra Desa Jonggon Jaya, Teguh Wiyono, Selasa (24/10/2023).

Teguh mengatakan, pihaknya hanya membantu proses distribusi dari program ini. Sedangkan untuk data penerimaan manfaat sendiri diterima langsung dari Bulog. Ia berharap, dengan penyaluran bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram ini, setidaknya bisa membantu dan meringankan beban hidup masyarakat. Terutama warga di Desa Jonggon Jaya.

"Rata-rata penerima bantuan ini lansia, kami hanya menyalurkan sesuai data yang diberikan," tambahnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi'i

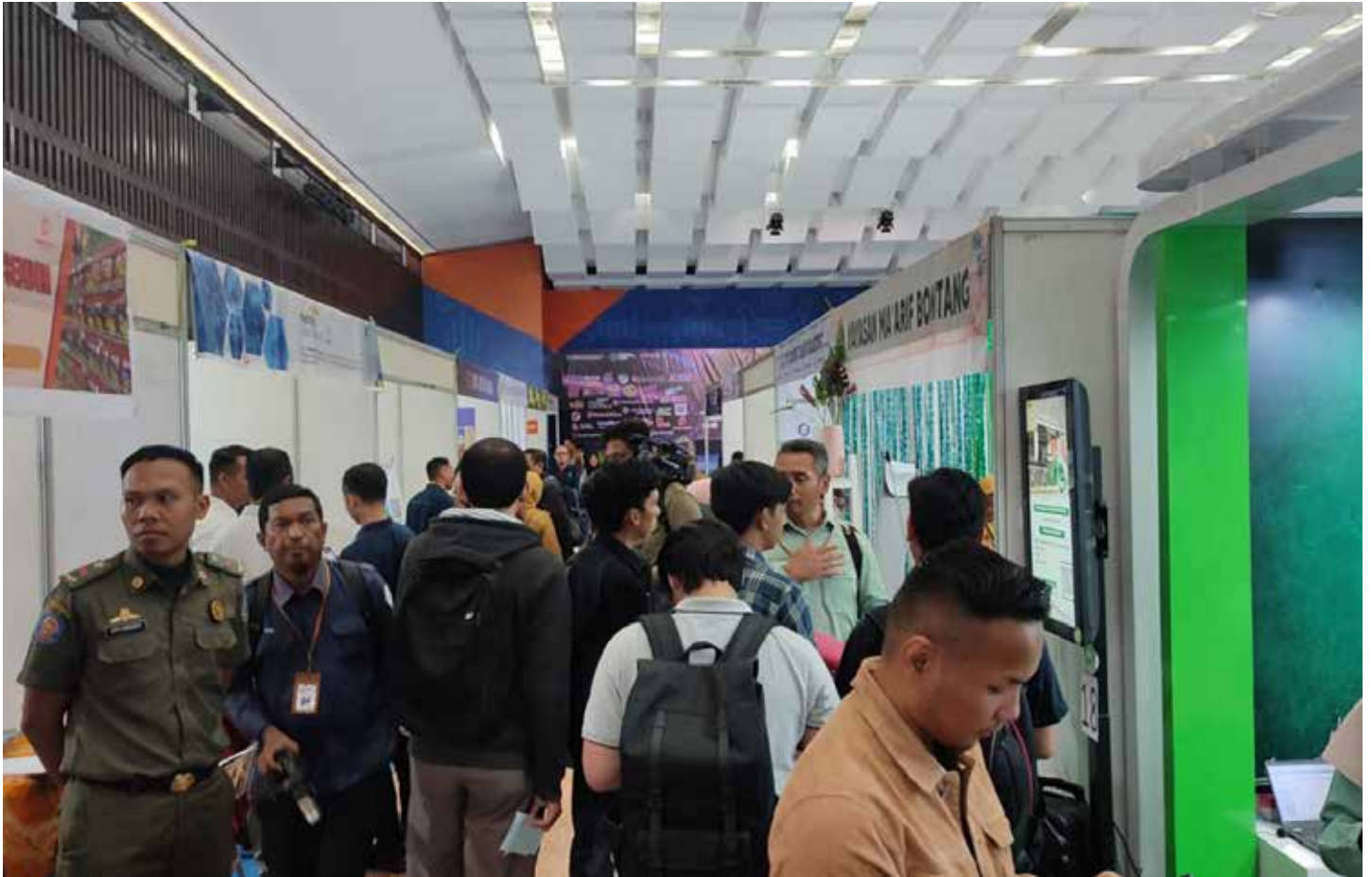


PENCAKER MEMBLUDAK DI HARI PERTAMA JOB FAIR 2023

BACA HALAMAN A2

**INOVASI KEMBANGKAN
PROGRAM TP-BIS**





Kondisi Job Fair hari Pertama. (Syakurah/Radarbontang)

Pencaker Membludak di Hari Pertama Job Fair 2023

BONTANG - Job Fair 2023, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang sudah dipenuhi para Pencari Kerja (Pencaker) sejak pagi.

Kegiatan ini berlangsung di Gedung Koperasi Karyawan mulai Selasa (24/10/23) hingga Jumat (27/10/23), sejak pukul 08.00 wita hingga 21.00 wita. Job Fair 2023 diikuti oleh 30 perusahaan.

Kepala Disnaker, Abdu Safa Muha menjelaskan, bahwa Job Fair ini pertama kali digelar oleh pihaknya. Sebelumnya sempat ada Job Fair di tahun 2022,

namun kegiatan itu garapan disnaker-trans provinsi.

"Job Fair kali ini murni kegiatan kami, oleh sebab itu jika ada masukan atau saran agar kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan mohon bantuannya, sehingga ke depan persiapan kami lebih matang," katanya.

Tidak hanya lowongan kerja, LPK serta perusahaan juga membuka pelatihan dan magang, sehingga cocok bagi para fresh graduate. Diketahui perusahaan tidak selalu membuka lowongan, sehingga dengan membuka lowongan magang bisa menambah skill untuk para pencaker.

Grace, salah satu pencaker yang mengunjungi Job Fair ini cukup antusias dengan membawa beberapa lamaran yang bisa ia ajukan ke banyak perusahaan. Ia mengaku mencari kerja di Bontang cukup sulit, dengan ikut Job Fair ini ia berharap memiliki kesempatan untuk magang ataupun bekerja.

"Saya sudah apply beberapa, senang sih ada Job Fair gini, harapannya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk saya dan pencari kerja lainnya," bebernyanya kepada redaksi.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



Lulyana Ramdhani, Kepala BNNK Bontang di Job Fair 2023. (Syakurah/Radarbontang)

Surat Bersih Narkoba Jadi Syarat Pencaker

BONTANG - Job Fair garapan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang resmi dibuka. Event yang berlangsung di Gedung Koperasi Karyawan (Kopkar) PKT ini bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Bontang untuk mewujudkan Kota Bontang yang bebas narkoba.

Lulyana Ramdhani, Kepala BNNK Bontang menjelaskan, bahwa pihaknya bekerjasama dengan Disnaker karena pada job fair ini para petinggi perusahaan turut hadir, dan akan merekrut para pekerja, sehingga diharapkan kepeduliannya terhadap calon karyawan.

"Perusahaan-perusahaan harus peduli dengan SDM-nya, sehingga para pekerja harus memiliki surat keterangan bersih narkoba," katanya, Selasa (24/10/23).

Hal ini sesuai dengan arahan dari kementerian tenaga kerja, yang mewajibkan tiap tahun melak-

sanakan tes narkoba di perusahaan kepada semua pegawai.

"Mulai sekarang kami mengharapkan, surat bersih narkoba menjadi salah satu persyaratan untuk berkes mencari pekerjaan," tambahnya.

Pihaknya telah membuka stand di Job Fair juga, agar para pencari kerja (pencaker) tidak perlu jauh-jauh tes urine di kantor BNNK. Untuk saat ini BNNK bergabung dengan salah satu stand yakni LPK Adjieradja. Adapun biaya yang harus dikeluarkan sekira Rp 290 ribu.

"Pencaker tes urine hari itu juga, dan akan langsung diberikan surat hari itu juga," ungkapnya.

BNNK bertekad tidak hanya melakukan pemberantasan, tapi juga pencegahan terutama kepada SDM Kota Bontang, agar perusahaan lebih produktif dan tidak mencoreng nama perusahaan tersebut.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam



Penyampaian materi di kegiatan penerimaan praktek profesi ners, di Ruang Aula Nusa Indah, RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi S)

RSUD Bontang Gelar Penerimaan Praktek Profesi Ners Mahasiswa

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang menggelar kegiatan penerimaan praktek profesi ners mahasiswa yang dilaksanakan di Ruang Aula Nusa Indah, Lantai 5 RSUD, Senin (23/10/2023) pukul 08.00 Wita. Kegiatan ini dihadiri oleh 11 orang mahasiswa, 8 dari RSUD dan 4 dari luar Rumah Sakit (RS).

Bambang Sri Mulyono, Koordinator Penunjang Keperawatan RSUD Bontang mengatakan, adanya kegiatan ini merupakan sebagian proses sosialisasi, atau proses orientasi bagi para mahasiswa yang ingin berpraktek perawat.

"Kegiatan ini berlangsung selama sehari penuh, dan beberapa muatan seperti pasien safety, kemudian sasaran keselamatan pasien, orientasi profil RS atau sebagainya," ucapnya.

Kegiatan praktek mahasiswa perawat ini dibuka untuk umum, siapa saja bisa ikut serta. Kegiatan ini sudah terlaksana bertahun-tahun, bukan pertama kali. Dimana RSUD Bontang sebagai tempat praktek mahasiswa.

"Untuk hari ini, ada sekitar 11 orang yang mengikuti. Sebenarnya banyak yang mengikuti, ratusan, bahkan ribuan. Hanya saja tidak terekspose," paparnya.

Bambang berharap tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di RS, istilahnya untuk mengawal mutu RS, RS juga tidak dirugikan dengan adanya kegiatan praktek, begitu pun sebaliknya.

Saling kerja sama satu sama lain.

Sementara itu, Institusi Penyelenggara Pendidikan Provinsi Ners bekerja sama dengan RSUD Taman Husada Bontang. Selain di Bontang bekerja sama juga dengan beberapa RSUD yang ada. Hampir di seluruh Kabupaten, bahkan paling jauh pun dari Kalimantan Utara (Kaltara) tepatnya di Malinau dan Tana Tidung.

Kiki Hardiansyah Safitri, ITKES (Institusi Tenaga Kesehatan) Wiyata Husada Samarinda menyatakan, telah bekerja sama dengan beberapa RSUD yang ada, bertujuan untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kami menggunakan RS menjadi tempat praktek profesi untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada di sini. Untuk profesi ners yang berkelanjutan dari sarjana keperawatan ini, merupakan mahasiswa yang dulunya jenjang D3, naik menjadi profesi ners," bebernya.

Perkuliahannya berlangsung selama 36 Minggu, efektifnya. Sudah menjadi target pemerintah, dengan seminggu waktu perkuliahan berlangsung selama 45 jam.

Kiki berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat mempunyai sebuah kemandirian di dalam profesinya. Rumah sakit yang 80 persennya adalah perawat, dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih meningkat. (dwi/adv).



Dr Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Dokter Spesialis Anak RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi)

Anak Takut ke Dokter? Ada Beberapa Tips Mudah Mengatasinya

BONTANG - Mengajak anak ke dokter sering kali menjadi tantangan bagi para orang tua. Sebagian besar anak menolak dan sangat rewel ketika akan diperiksa oleh dokter. Anak menjadi takut saat diperiksa oleh dokter, membuat sebagian orang tua cemas dan khawatir.

Dokter Arlita Eka Putri Vivin Puspitasari, Sp.A, Dokter Spesialis Anak di RSUD Taman Husada Bontang memberikan beberapa tips dan cara mudah untuk mengatasi anak jika ingin diperiksa oleh dokter.

"Ada beberapa kepentingan anak saat bertemu dengan dokter. Bisa jadi datang menemui dokter saat lagi kontrol, periksa karena keadaan batuk pilek, bahkan saat anak disuntik untuk vaksinasi," ucapnya saat diwawancarai awak media radarbontang.com, Selasa (24/10/2023).

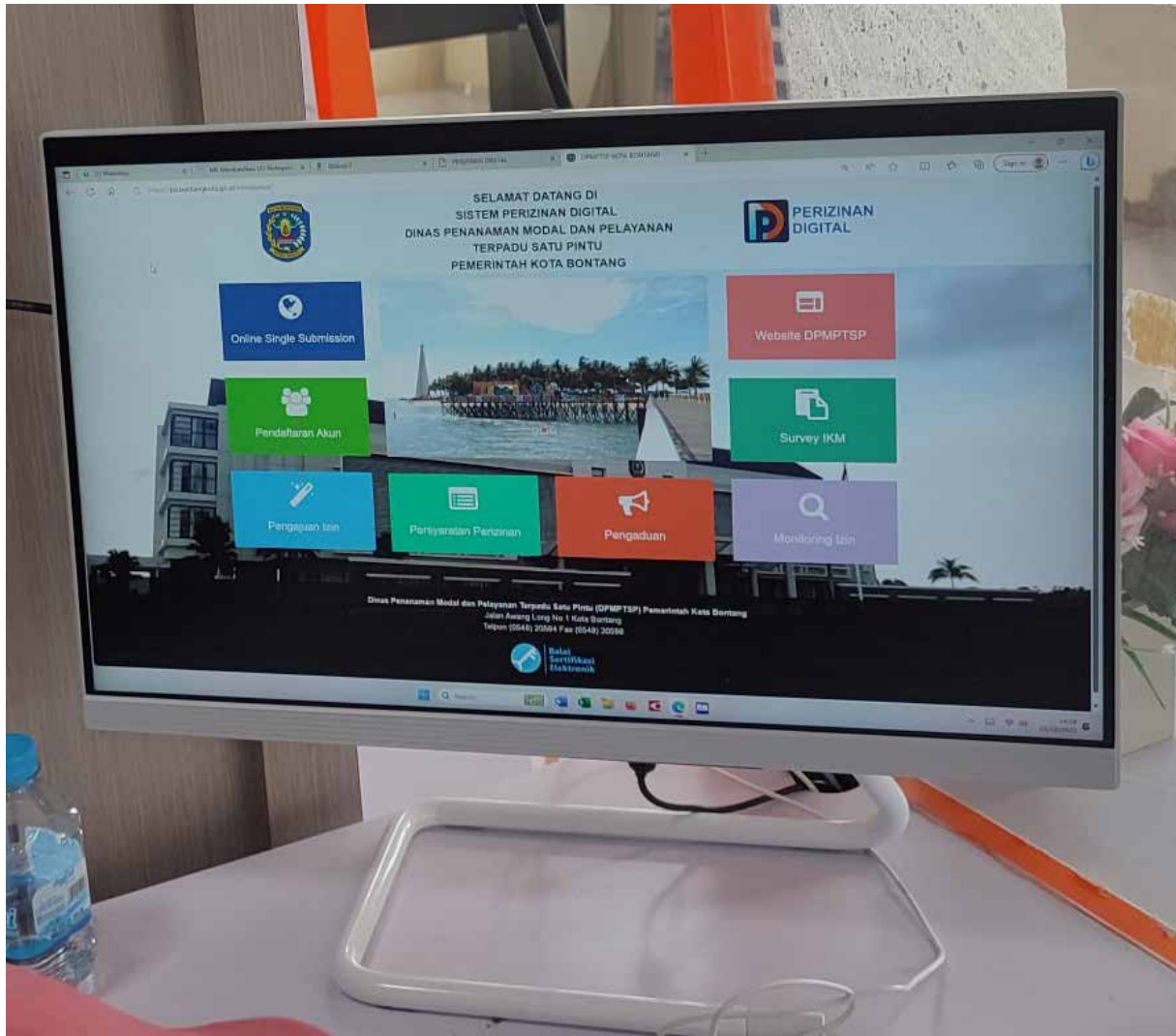
Ia menyampaikan, jika nantinya akan pergi ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit (RS), bahkan ke klinik, disarankan agar anak bisa membawa mainan, atau cemilan kesukaan anak.

"Nantinya saat pergi menemui dokter anak-anak bisa membawa mainan favoritnya, biar mereka merasa nyaman. Bahkan bisa juga membawa cemilan atau snack kesukaan mereka," paparnya.

Selain membawa mainan atau cemilan kesukaan anak, kita sebagai orang tua tidak boleh berbohong kepada anak, atau memberikan harapan palsu yang sekiranya anak itu menjanjikan.

"Jangan juga berbohong, misalkan mengatakan jika nantinya di RS sangat banyak mainan, atau segala macam. Intinya jangan memberikan harapan yang tidak pasti kepada anak-anak," ungkapnya.

Selain itu juga, dr Arlita juga menambahkan, beberapa hari sebelum pergi ke puskesmas, RS, atau klinik, anak terlebih dulu diberi arahan untuk pemeriksaan. Bahkan dipraktekkan di rumah, seperti apa dokter melakukan pemeriksaan. Mulai dari membuka mulut, mengecek suhu badan menggunakan termometer, bahkan memeriksa bagian dada menggunakan stetoskop. (dwi/adv).



Website perizinan digital DPMPTSP. (Syakurah/Radarbontang)

DPMPTSP Buka Pelayanan Online Sejak 2018

BONTANG - Salah satu langkah memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat yang semakin modern ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah membuka perizinan online sejak 2018 lalu.

Pelayanan ini milik pemerintah daerah namun dikelola oleh DPMPTSP. Beberapa perizinan sebenarnya telah dialihkan ke Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) mulai 2019, sehingga dalam perizinan digital terdapat 46 jenis kepengurusan sisanya.

Beberapa jenis yang dapat diurus di perizinan digital yakni izin bongkar trotoar, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin mendirikan rumah sakit

pemerintah, izin operasional klinik pemerintah, izin operasional laboratorium kesehatan, izin operasional puskesmas, izin operasional rumah sakit pemerintah dan masih banyak lagi.

Kepengurusan ini dapat dilakukan di rumah dengan membuka website <https://pd.bontangkota.go.id> atau datang langsung ke DPMPTSP, nantinya jika datang ke PTSP akan diberikan arahan terkait berkas-berkas yang harus diupload.

"Kalau berkas yang diurus melalui perizinan digital itu biasanya ada jangka waktunya sekitar 6 bulan, kalau izin di OSS-RBA bisa berlaku selamanya," jelas Fidia, Customer Service DPMPTSP. (sya/adv)



Ekspose hasil IKM DPMPTSP semester I tahun 2023. (Syakurah/Radarbontang)

Ekspose Hasil IKM, DPMPTSP Raih Nilai Baik

BONTANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang melaksanakan ekspose hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Triwulan I, Senin (23/10/2023).

Adapun latar belakang IKM yakni mengukur pelayanan publik melalui penilaian masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan di setiap bagian penyelenggara.

"Triwulan I ini dinilai dari Bulan Januari hingga Juni tahun 2023," kata Jabatan Fungsional (Jab-fung) Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Ekonomi DPMPTSP Bontang, Natalia Santi Kanan.

Dikegiatan ini DPMPTSP bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG-PA), LP2M Universitas Mulawarman. Dilakukan kepada masyarakat yang menggunakan layanan DPMPTSP.

Sistem Perizinan digital DPMPTSP total terdapat 467 layanan, melalui OSS-RBA 369 layanan, sehingga total pegguna layanan 836 selama triwulan I.

Berdasarkan hasil survei menurut profil responden berumur 19 sampai 44 tahun ada sebanyak 177 (66,79%), usia 45-59 tahun sebanyak 81 (30,57%), dan usia lebih dari 60 sebanyak 7 (2,64%).

Selain itu, jenjang pendidikan mulai tidak sekolah hingga strata 2 ke atas, jenis pelayanan serta unsur pelayanan juga menjadi pertimbangan dalam penilaian tersebut. Sehingga setelah dilakukan konversi nilai, DPMPTSP mendapatkan total nilai sebesar 87.50 yang termasuk dalam kategori B atau Baik.

P2KG-PA juga memberikan rekomendasi untuk jangka pendek hingga jangka panjang, seperti mengidentifikasi masalah utama, feedback pelanggan, perencanaan strategis dan masih banyak lagi.

"Sistem OSS RBA sangat memengaruhi penilaian IKM ini karena sistem bisa saja mengalami eror, tapi kami tentu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," jelasnya. (sya/adv)



HM SYAFRANUDDIN
Kepala Dinas Perpustakaan
& Kearsipan (DPK) Kaltim

RADAR BONTANG
AKTUAL & TERPERCAYA .COM

KORAN DIGITAL



DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN KALIMANTAN TIMUR

EDISI MINGGU KE 4 - OKTOBER 2023



INOVASI KEMBANGKAN PROGRAM TP-BIS



Nikko Dwi Angga, Pustakawan Ahli Muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

INOVASI KEMBANGKAN PROGRAM TP-BIS

SAMARINDA - Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TP-BIS) merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

Program TP-BIS termasuk ke dalam program prioritas nasional yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perpustakaan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial bertujuan untuk memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan literasi masyarakat akan semakin meningkat yang akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nikko Dwi Angga, Pustakawan Ahli Muda, Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengungkapkan bahwa pelaksanaan program TP-BIS ini adalah salah satu upaya perwujudan tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Ini adalah amanat tujuan berbangsa dan bernegara, termaktub dalam pembukaan UUD, mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," tutur Nikko

Menurut Nikko, perpustakaan tidak lagi hanya sekadar menjadi tempat menyimpan buku, tetapi harus menjadi agen perubahan, dengan cara menghadirkan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat.

Di Provinsi Kalimantan Timur, pelaksanaan TP-BIS menjangkau 18 perpustakaan. Untuk saat ini di

Berau sudah melaksanakan program TP-BIS secara mandiri.

"TP-BIS di Kaltim masih 18 perpustakaan, tetapi masih banyak desa dan kelurahan yang belum dijangkau karena beberapa faktor," ungkap Nikko

Untuk kedepannya, DPKD Kaltim mencanangkan projek TP-BIS dengan target 5 desa agar bisa direplikasi secara mandiri oleh kabupaten/kota, dan dibutuhkan sinergisitas antar stakeholder di daerah agar program ini dapat terimplementasi dengan baik.

"Kalau menjangkau semua kelurahan & desa, kami terbatas dana. Jadi nanti akan direncanakan untuk 5 desa sebagai projek autopilot. Tetapi butuh kolaborasi semua pihak. Semoga bisa teralisasi," pungkasnya. (dsy/adv/DPKD)

Pewarta : Desy Alvionita
Editor : Nicha Ratnasari



'Numerasi Batu Bertulis Yupa' Buku Sejarah Martapura di Kutai



Buku "NUMERASI BATU BERTULIS YUPA" tentang Kerajaan Martapura di Kutai, Kalimantan Timur, ditulis tiga akademisi dari Samarinda, yaitu Fitria Nurul Hidayah, Kurniawan, dan Yulian Widya Saputra.

SAMARINDA - Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baru-baru ini menerima kedatangan dua penulis Kaltim. Kedatangan para penulis ini diterima dengan baik oleh Pustakawan Ahli Muda Fatimah Irny di Ruang Seksi Deposit dan Alih Media yang terletak di Lantai 3.

Fatimah menjelaskan tujuan kedatangan mereka adalah menyumbangkan buku hasil penelitian mereka terkait sejarah di Kaltim, khususnya mengenai tugu batu yupa yang pernah ditemukan di bantaran Sungai Mahakam di Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara.

"Buku tersebut berjudul 'NUMERASI BATU BERTULIS YUPA,' yang membahas tentang kerajaan Martapura di Kutai, Kalimantan Timur," ungkapnya.

Fatimah mengaku sangat bangga dengan para penulis asal Kaltim ini, yang semuanya merupakan dosen di lembaga universitas yang ada di Kaltim. Ini karena sangat sedikit penulis yang memberikan perhatian terhadap peninggalan bersejarah seperti tugu batu yupa yang banyak ditemukan di Kaltim, terutama di Kutai Kartanegara.

"Tentu saja, buku ini akan lebih memperkaya koleksi konten lokal dan khasanah kearifan lokal Kalimantan Timur. Penelitian tiga akademisi ini berfokus pada prasasti Yupa, membawa pengetahuan baru dalam bidang matematika dan unsur-unsur etnomatematika," ujarnya.

Penulis buku "NUMERASI BATU BERTULIS YUPA" tentang kerajaan Martapura di Kutai, Kaltim, adalah tiga orang aka-

demisi dari Samarinda, yaitu Fitria Nurul Hidayah, Kurniawan, dan Yulian Widya Saputra.

Fitria Nurul Hidayah adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, sementara Kurniawan dan Yulian Widya Saputra keduanya adalah dosen di Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta Program Studi Matematika Universitas Mulawarman (Unmul).

Para penulis menemukan penomoran bilangan matematika yang dulunya ditulis dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam huruf Pallawa berbahasa Sanskerta di atas Yupa, sebuah tongkat batuan beku monolit, yang merupakan peninggalan kerajaan Martapura di Kutai.

Tim penulis menghadapi kendala dalam menggarap tulisan ini, terutama dalam proses pencarian alih aksara Kuno, karena tidak semua orang memahami aksara tersebut. Selain itu, mereka juga melakukan wawancara dengan ahli sejarah, yang memakan waktu satu tahun untuk berproses dengan ahli aksara Kuno yang ada di Museum Nasional.

"Mereka harus menyesuaikan jadwal pertemuan dengan beliau karena memang orang yang menguasai aksara Kuno tersebut sangat langka, bahkan ada yang berada di Kaltim. Beliau membantu kami dalam penulisan huruf Pallawa, karena saat ini hampir tidak ada yang memahami Bahasa Sanskerta," kata salah seorang penulis, Kurniawan.

Buku yang mengkaji numerasi ini di-

kaji melalui pendekatan ilmu sejarah dan dipadukan dengan multidisiplin ilmu, seperti geografi dan matematika (etnomatematika).

Diharapkan keterpaduan ketiga disiplin ilmu ini dapat mengungkap kegiatan numerasi masyarakat nusantara yang terwakili oleh kerajaan Martapura (Kutai Kuno) di Kalimantan Timur.

"Prasasti Yupa menggunakan Bahasa Sanskerta dengan Aksara Pallawa. Numerasi yang ditemukan berhubungan dengan kuantitas dan bilangan," ujar Kurniawan.

Numerasi Kerajaan Kutai pada masa Hindu-Buddha abad ke-5 Masehi dalam teks Sanskerta diartikan sebagai "Aika," yang dalam Bahasa Indonesia berarti "Satu." Kata "Dasa" berarti sepuluh. "Aikadasa" berarti sebelas. Kosakata "aika," "dwi," "tri," dan seterusnya memiliki arti urutan atau penomoran anak dalam sebuah keluarga, selain itu, juga memiliki makna sebagai tanggal lahir seseorang.

Dulu, "Aika" menandakan angka satu, namun pada zaman sekarang ada perubahan fonem menjadi "Eka," yang menandakan anak pertama atau angka satu. Pagi ini, bersama dua penulis dan pengunjun, mereka dengan penuh semangat berharap bahwa buku yang mereka sumbangkan dapat dibaca oleh masyarakat luas, terutama masyarakat Kaltim.

"Masyarakat perlu mengetahui bahwa di Kaltim ini ada aksara Kuno yang tertulis di batu Yupa," pungkas Kurniawan. **(ADV/Han/DPKD).**

Pewartar: Hanaf
Editor: Agus Susanto



Seorang Pengunjung Melihat Foto Bersejarah Kota Samarinda. (Hanafi)

KENALI TOKOH SEJARAH DI DPK SAMARINDA

SAMARINDA - Ingatlah pidato presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang mengatakan, "Jangan lupakan jejak-jejak sejarah" (Jasmerah). Isi pidato ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan sejarah. Apa yang telah kita capai di masa lampau adalah awal dari perjalanan menuju apa yang akan kita capai sekarang dan menjadi bekal untuk masa depan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda memamerkan foto-foto bersejarah yang menggambarkan kehidupan Kota Samarinda di masa lalu serta sejarah kepemimpinan Kota Samarinda dari Walikota Pertama hingga Walikota saat ini.

Foto-foto ini dipajang di Lantai 2 gedung Layanan Perpustakaan Kota Samarinda yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa. Foto-foto tersebut dipajang

di sudut ruangan.

"Kami sengaja memajang foto-foto ini agar generasi kita tahu tentang sejarah Kota Samarinda melalui gambar-gambar ini," ungkap Kepala Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi.

Foto-foto yang dipamerkan juga mencakup sejarah Presiden pertama Soekarno saat berkunjung ke Kota Samarinda menggunakan pesawat amfibi yang mendarat di air.

"Ini adalah foto saat Presiden pertama Soekarno mendarat di Bandara pertama milik Indonesia, yaitu Sungai Mahakam, karena saat itu Kota Samarinda belum memiliki bandara konvensional. Dia kemudian disambut dan dijemput menggunakan speedboat baru sebelum mendarat di dermaga," jelas Edy.

Edy mengakui bahwa masih ada beberapa foto yang belum terpajang. Dia berharap tahun depan dapat melengkapinya.

"Masih ada beberapa foto Wakil Walikota yang belum terpajang, semoga tahun depan kami bisa melengkapinya dan menambah koleksi foto-foto ini," katanya.

Dengan dipamerkannya foto-foto bersejarah ini, Edy berharap bahwa generasi milenial dan Generasi Z akan lebih mengenal sejarah para pemimpin Kota Samarinda serta memahami sejarah Kota Samarinda.

"Kami berharap bahwa anak-anak muda kita akan memahami sejarah Kota Samarinda dan para pemimpinnya melalui foto-foto bersejarah ini, dan tidak melupakan Jasmerah," tutupnya. **(ADV/Han/DPKD)**

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto



Dari Kanan: Rachmawati Bersama Anak-Anak Didiknya di TBM Iqro

PUNYA SEGUDANG PRESTASI, TBM IQRO RAIH PENGHARGAAN NASIONAL

SAMARINDA - Rachmawati dan Taman Baca Masyarakat (TBM) Iqro yang dimilikinya telah mengumpulkan sejumlah prestasi mulai dari tingkat Pemerintah Kota Samarinda hingga tingkat Nasional.

Dalam catatan yang terdapat di situs web TBM Iqro yang berdiri sejak tahun 2015, prestasi-prestasi telah diraih sejak tahun 2017. Prestasi tersebut melibatkan Rachmawati secara individu, Lembaga TBM Iqro, dan bahkan anak-anak didik TBM Iqro.

Rachmawati menyatakan kebahagiaannya atas semua prestasi ini, baik yang diraih secara individu maupun oleh Lembaga TBM Iqro dan anak-anak didiknya. Hal ini tentu tidak lepas dari usaha Rachmawati dalam mempromosikan budaya literasi, terutama di kalangan anak-anak sekolah di sekitar TBM.

"Kegiatan di TBM Iqro rutin

diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu, dengan partisipasi sekitar limapuluh anak didik. Pada hari Minggu, biasanya menjadi waktu yang paling ramai. Kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan mencakup berbagai aktivitas seperti membaca buku, membaca puisi, mendongeng, dan menari," jelas Rachmawati.

Rachmawati berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap semua TBM yang ada di Kalimantan Timur.

"Kami berharap agar Dinas Pendidikan dapat memberikan bimbingan dan perhatian yang lebih, terutama dari pemerintah provinsi, dan semua ini dapat didukung oleh Dinas Provinsi," katanya.

Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Rachmawati termasuk Juara 1 dalam pembuatan alat peraga pendidikan tingkat Kota

Samarinda pada tahun 2017, Juara 3 dalam kompetisi vlogger dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara pada tahun 2018, Juara 1 sebagai pengelola TBM tingkat Kota dan Kalimantan Timur pada tahun 2021, dan yang terbaru adalah menerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka pada tahun 2023, selain masih banyak prestasi lainnya.

Sementara itu, prestasi yang diraih oleh Lembaga TBM Iqro termasuk menjadi TBM yang menciptakan buku cerita bergambar terbaik tingkat Kota Samarinda pada tahun 2018.

TBM Iqro terletak di Jl. Juyo Mulyo Gg. Atthoriq, RT. 37/RW. No. 61, Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. Tempat ini berada di rumah pribadi Rachmawati yang juga ditempati bersama keluarganya. **(Han)**

Pewarta: Hanafi

Editor: Agus Susanto



Rahmawati saat menerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023

INISIASI TBM IQRO, RACHMAWATI RAIH PENGHARGAAN NASIONAL NUGRA JASA DHARMA PUSTALOKA 2023

SAMARINDA - Penerima Penghargaan Nasional Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023, Rachmawati, mengungkapkan kebahagiaannya atas pengakuan sebagai pegiat literasi di Kota Samarinda.

Rachmawati meraih penghargaan ini atas pengakuan keterlibatannya yang aktif, efektif, dan inovatif dalam mengelola Taman Baca Masyarakat (TBM) Iqro yang berlokasi di Jl. Juyo Mulyo Cg.Atthoriq, RT.37/RW.No.61, Lempake, Kecamatan Samarinda Utara.

"Tentu saja, saya sangat bahagia dan bersyukur atas penghargaan ini," kata Rachmawati, yang juga seorang Pustakawan Fastabiqul Khairat Samarinda Ulu.

Tidak banyak orang yang bersedia menjalankan kegiatan pengajaran kepada masyarakat sekitar secara gratis atau tanpa bayaran. Rachmawati mengelola TBM-nya tanpa memungut biaya, semata-mata atas dasar keikhlasan dan kerja kerasnya. Ia telah menerima berbagai penghargaan di tingkat daerah dan nasional sebagai pengakuan atas dedikasinya ini.

Saat mediakaltim.com mengunjungi TBM Iqro, terlihat bahwa TBM ini berada di rumah pribadi milik Rachmawati, yang juga tinggal bersama suami dan anak-anaknya.

Ruangan tengah rumah dipenuhi oleh lemari yang berisikan ribuan buku dan karya seni dari anak-anak didiknya. Di dinding, terpampang penghargaan-penghargaan yang telah diraihnya, serta di luar rumah terdapat sebuah gazebo yang digunakan untuk latihan menari dan membaca.

"Ketika saya pertama kali ingin mendirikan TBM Iqro ini, suami saya bertanya

apakah rumah ini akan digunakan sebagai tempat umum. Saya menjawab 'iya', dan akhirnya suami saya menyetujuinya," ungkap Rachmawati.

"TBM Iqro ini berdiri sejak tahun 2015 dan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti membaca, menulis, menggambar, menari, dan lain-lain. Kegiatan ini berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu," tambahnya.

Meskipun telah mencurahkan hati dan tenaganya dalam mengelola TBM Iqro ini, Rachmawati bahkan pernah mendapat tuduhan eksploitasi anak, padahal TBM yang dikelolanya tidak memungut biaya sepeser pun, alias gratis.

"Ada saja tuduhan miring bahwa saya mengambil keuntungan dari anak-anak, padahal saya tidak pernah meminta imbalan apa pun. Saya melakukannya karena ikhlas dan sebagai bentuk ibadah, serta untuk memberikan kegiatan literasi kepada anak-anak di sekitar sini. Saya tidak peduli dengan omongan orang, yang penting TBM ini terus berjalan," jelasnya.

Dengan dedikasinya, Rachmawati akhirnya menerima penghargaan nasional, termasuk Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023 yang diberikan oleh Perpustakaan RI pada acara Malam Gemilang Perpustakaan 2023 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada Rabu (11/10/2023) lalu.

"Saya sangat bahagia dan bersyukur atas penghargaan ini, terutama karena penghargaan ini diterima di Jakarta," ungkap Rachmawati.

Awalnya, Rachmawati merasa terkejut ketika mengetahui namanya masuk da-

lam daftar penerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023. "Awalnya, niat saya hanya agar nam saya masuk sebagai finalis, mengingat pesaing saya berasal dari seluruh Indonesia. Namun, saya akhirnya terkejut ketika mendapatkan penghargaan ini," akunya.

Menurut Nurhikmah, Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda, TBM Iqro milik Rachmawati dinilai aktif, efektif, dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan literasi, seperti mengajar anak-anak membaca, menulis, membuat, dan menari. Oleh karena itu, Rachmawati dinilai pantas menerima penghargaan dari Perpustakaan RI.

"Ibu Rachmawati sangat aktif dalam mengajar anak-anak di sana untuk membaca, menulis, dan menari. Selain itu, ia juga sering mengadakan pelatihan dan bedah buku di taman bacaan rumahnya. Itulah mengapa ia terpilih sebagai penerima penghargaan nasional ini," jelas Nurhikmah.

Rachmawati adalah salah satu dari 22 individu/lembaga yang menerima Penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka 2023 dari Perpustakaan RI. Penghargaan ini diberikan setiap tahun sebagai apresiasi tertinggi dari pemerintah melalui Perpustakaan Nasional (Perpustakaan) Republik Indonesia kepada individu, kelompok, dan lembaga yang berhasil meningkatkan literasi dan minat membaca secara aktif, efektif, dan inovatif melalui pemanfaatan perpustakaan. (adv/han/dpkd)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus Susanto



Plh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim, Taufik.

TOUR LIBRARY KALTIM 2023 SAMARINDA, BONTANG, KUTIM & BERAU

SAMARINDA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kalimantan Timur (Kaltim), telah menetapkan tanggal pelaksanaan Tour Library 2023. Hal ini dikatakan langsung oleh Plh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim Taufik saat ditemui di ruang kerjanya.

"Iya kita sudah rapat dengan kabupaten dan kota yang terlibat, dan tetapkan tanggal penyelenggaraan Tour Library Kaltim tahun ini, yakni tanggal 13 November sampai 20 November 2023," ujarnya.

Tahun ini Tour Library Kaltim, jalur kunjungannya berbeda dengan tahun 2022 lalu. Jika tahun 2022 Tour Library Kaltim ke arah selatan Kaltim, kali ini ke arah Utara Kaltim. "Tahun lalu kita ke arah selatan Kaltim, ta-

hun ini kita ke Utara yakni kita mulai dari Samarinda, Bontang, Kutim dan terakhir ke Berau," ungkapnya.

Saat ini mobil perpustakaan keliling yang sudah disiapkan dari 10 kabupaten kota, sekitar 10 sampai 12 mobil perpustakaan keliling.

"Kita akan melibatkan dalam Tour Library Kaltim 2023 ini sekitar 10-12 mobil perpustakaan keliling" tambahnya.

Dan untuk kegiatan semua tempat baik itu di kota atau kabupaten yang disinggahi semua sama, hanya tempatnya yang berbeda.

"Untuk kegiatan semua sama cuma locus-nya yang berbeda," tutupnya. **(ADV/Han/DPKD)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



SEBUT TAHUN 2024 MENDATANG ADA PENGANGGARAN UNTUK ABRASI DI PULAU BALIKUKUP



**MADRI TINJAU KONDISI KANTOR
CAMAT PULAU DERAWAN**



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga saat meninjau kondisi abrasi Pulau Balikukup.

SEBUT TAHUN 2024 MENDATANG ADA PENGANGGARAN UNTUK ABRASI DI PULAU BALIKUKUP

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga meninjau Pulau Balikukup yang tergerus akibat abrasi. Hal itu pun membuat dirinya merasa miris.

Dia mengaku sangat mengkhawatirkan kondisi tersebut. Peralnya, sekitar 30 sampai 40 meter daratan sudah tergerus akibat adanya abrasi pantai tersebut.

“Tentu ini harus menjadi sebuah perhatian untuk segera mendapatkan penanganan,” ungkapnya.

Dirinya menyebut, untuk melakukan penanganan agar abrasi tidak meluas, ada beberapa prosedur dan mekanisme yang harus dilalui.

“Penanganannya ada di BWS Pemprov Kaltim. Jadi agar persoalan abrasi ini bisa ditangani, kita harus datang ke sana,” jelasnya.

Saga membeberkan, untuk penanggulangan abrasi di Pulau Balikukup sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2024.

“Jika sudah dianggarkan seperti itu, besar harapan saya penanganan abrasi di Pulau Balikukup bisa teratasi,” tuturnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap, persoalan abrasi jangan dibiarkan berlarut-larut. Sebab, kata Saga, dikhawatirkan berdampak kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan bisa segera ditanggulangi, apalagi abrasi sudah memakan bibir pantai dan itu cukup luas,” tandasnya. (adv/set)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Ketua DPRD Berau, Madri Pani saat meninjau kondisi Kantor Kecamatan Pulau Derawan.

MADRI TINJAU KONDISI KANTOR CAMAT PULAU DERAWAN

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menemui kondisi Kantor Camat Pulau Derawan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sebab, selalu mengalami kebocoran ketika hujan.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau seharusnya dapat merehabilitasi Kantor Camat Pulau Derawan. Pasalnya merupakan pusat pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat juga ada melapor, bahwa mereka merasa risih dan tidak nyaman dengan kondisi kantor camat Pulau Derawan ini,” ungkapnya.

Madri menyebut, penampilan kantor tersebut terkesan masih baru. Namun ada beberapa bagian konstruksi yang bermasalah, seperti dinding retak hingga atap bocor.

“Ini kan kantor pelayanan. Masa tampilannya seperti itu. Kalau kantor bocor pelayanan terganggu,” katanya.

Dirinya mendorong kerusakan dapat dilakukan perbaikan, tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.

“Apalagi, letaknya di tempat wisata. Sehingga, kantor camat ini harus dibenahi karena menjadi perwajahan Kecamatan Pulau Derawan,” tegasnya.

Politikus NasDem inj meminta OPD terkait untuk memprioritaskan perbaikan Kantor Kecamatan Pulau Derawan di tahun mendatang.

“Jika kantornya rusak dan jelek masyarakat juga malas mau datang. Apalagi ini cukup jauh dari pusat kota. Semoga tahun depan bisa dilakukan perbaikan,” pungkasnya. (adv/set)



Anggota DPRD Berau, Sri Kumalasari.

CEGAH PENYEBARAN RABIES, DORONG HEWAN PELIHARAAN DIBERIKAN VAKSINASI

TANJUNG REDEB – Penyakit rabies masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Pasalnya, beberapa waktu lalu dikabarkan ada seorang anak yang meninggal akibat digigit hewan yang mengalami rabies.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari menghimbau masyarakat agar lebih ketat dalam menjaga hewan peliharaannya serta rutin memberikan vaksinasi.

“Hal ini tidak bisa kita anggap remeh, jika kita lalai nyawa manusia jadi taruhannya,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia juga meminta Pemkab Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan upaya-upaya atau sosialisasi serta melakukan vaksinasi gratis untuk hewan milik masyarakat.

“Jika bisa jempot bola, ke wilayah-wilayah

yang banyak hewan yang memiliki potensi menyebabkan rabies ini,” tuturnya.

Politikus Golkar ini menekankan untuk rutin melakukan pemeriksaan dan vaksinasi. Jangan sampai, sudah ada kejadian dan korban baru bergerak. Ditambah vaksinasi disediakan gratis oleh OPD terkait.

“Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah daerah melalui Dinas terkait harus bergerak terlebih dahulu, jangan menunggu masyarakat. Ini yang salah,” tegasnya.

Dirinya berharap, penanganan dan pencegahan rabies ini bisa ditangani oleh semua pihak, tidak hanya Pemkab Berau, OPD terkait, tapi juga masyarakat harus ikut peduli dengan lingkungan.

“Khusus para pemilik hewan peliharaan, jangan biarkan bebas tanpa pengawasan,” tandasnya. **(adv/set)**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU**



Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah.

HARAP PEMBANGUNAN SIRKUIT DISEGERAKAN

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah mempertimbangkan pembangunan sirkuit balap motor. Hal itu dinilai agar meminimalisir aksi balap liar yang kerap terjadi.

Dia mengungkapkan, sirkuit balap motor sudah memiliki lokasi, yakni di kawasan Kecamatan Gunung Tabur.

“Tinggal proses pembangunannya lagi yang disegerakan,” ungkapnya saat ditemui awak media ini.

Dirinya menyebut, pembangunan sirkuit balap motor itu akan dilaksanakan pada 2024 mendatang, den-

gan alokasi anggaran yang sudah dipersiapkan.

“Mudah-mudahan ke depan kita bisa anggarkan agar tidak terjadi lagi balap liar seperti yang telah terjadi di beberapa hari terakhir ini,” katanya.

Suriansyah sangat berharap agar pembangunan sirkuit balap dapat segera terealisasi sehingga masalah balap liar dapat diatasi di Berau.

“Karena memang sirkuit balap ini harus kita berikan untuk menampung hobi balap mereka, supaya tidak ada balap liar di luar, dan supaya menjaga ketertiban,” pungkasnya. (adv/set)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BERAU



Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ihsan Rapi.

KAPAL PENGANGKUT SAMPAH JANGAN SAMPAI MANGKRAK

TANJUNG REDEB – Adanya inovasi DLHK Berau mengenai pengadaan dua unit kapal pengangkut sampah diapresiasi Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ihsan Rapi.

Dia menuturkan, kapal pengangkut sampah tersebut harus beroperasi sebagaimana mestinya. “Tidak masalah kalau mau ada pengadaan kapal pengangkut sampah, kita dukung. Asal jangan sampai mangrak saja,” tegasnya.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengadaan kapal tersebut, yakni operator kapal yang akan menjalankannya. “Kalau

ada kapal tentu harus dipikirkan siapa operatornya, jangan sampai hal-hal seperti itu terlupakan,” tuturnya.

Dirinya mengingatkan DLHK jangan sampai kapal ini hanya menjadi pajangan seperti halnya penghisap debu yang dimiliki oleh DLHK. Hal ini juga perlu kerja sama antara Pemkab dan UMKM yang ada di pinggiran Sungai Kelay dan Segah untuk selalu komitmen dengan tidak membuang sampah di sungai.

“Supaya program ini bisa berjalan dengan baik perlu ada kerja sama yang baik dengan masyarakat juga,” pungkasnya. **(adv/set)**

KORAN **DIGITAL**

radar.
MEDIA

RADAR BALIKPAPAN

EDISI RABU
25 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM



JELANG PEMILU 2024, AWAS BANYAK "KENTUT SETAN"



**WAPRES RI BUKA SILATNAS KE-VII
KONSAIN DI BALIKPAPAN**



Wakil Presiden RI, K.H Ma'ruf Amin

JELANG PEMILU 2024, AWAS BANYAK “KENTUT SETAN”

BALIKPAPAN - Wakil Presiden RI, K.H Ma'ruf Amin turut berkomentar perihal Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Wapres pun berkomentar jika dimasa-masa kampanye nanti, masyarakat Indonesia diminta untuk cerdas dalam menanggapi satu isu atau informasi. Sehingga tidak akan termakan berita bohong atau hoax. Parahnya lagi pada saat pemilu mendatang, Wapres menyebut bakal banyak “Kentut Setan”.

“Kentut Setan” di sini digambarkan Wapres adalah bentuk tidak saling percaya terhadap keluarga, teman dan lingkungan. Pasalnya, antara mereka akan menaruh rasa saling curiga.

“Jadi ada 3 orang santri yang sangat kompak. Mereka selalu bersama-sama dalam hal salat, baca quran dan lainnya. Setan ini tidak senang dengan

mereka. Untuk memecah ketiganya, maka setan berusaha menggodanya. Yaitu saat mereka salat, setan kentut. Mereka bertiga saling tuduh dan akhirnya nggak mau salat bertiga lagi karena suka kentut,” ujarnya saat membuka Silaturahmi Nasioanl ke-VII Kontak Santari Agribisnis Indonesia, Selasa (24/10/2023).

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, dengan mencontoh hal tersebut ia berharap masyarakat Indonesia cerdas dalam menerima masukan, pendapat dan keritik. Dan tak mudah tersulut emosi jika berbeda pendapat. Karena seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya adalah saudara.

“Jadi jangan mau jika ada setan yang mengganggu saat pemilu. Kita harus pintar, kita harus cerdas. Beda pendapat sah-sah saja,

tapi tidak boleh terpecah belah,” jelasnya.

Terkait anak Presiden RI, Joko Widodo yang maju sebagai Wakil Presiden dari Prabowo, Ma'ruf Amin pun turut mengomentarnya. Ia beranggapan hal tersebut adalah hak seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan ia memastikan jika tidak ada turut campur tangan sang Presiden.

“Insya Allah semua akan berjalan secara profesional. Penyelenggara juga harus on the track, ikuti sesuai aturan yang berlaku. Kan kalau ada yang aneh-aneh masyarakat bisa menyaksikannya langsung. Maka kita percayakan semuanya kepada pihak penyelenggara dan pengawas pemilihan umum, kepala daerah dan presiden dan wakil presiden,” tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin saat membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain) di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Selasa (24/10).

WAPRES RI BUKA SILATNAS KE-VII KONSAIN DI BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin membuka secara langsung Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain) di Pondok Pesantren Syaichona Cholil, Selasa (24/10/2023).

Sebelum membuka secara resmi, Wapres sempat memberi arahan kepada kiai, bu nyai dan para santri terkait peran santri di Indonesia. Hal ini tak lepas dari Hari Santri Nasional yang baru saja diperingati pada 22 Oktober kemarin.

Wapres mengatakan, peran santri dalam bidang pembangunan di Indonesia sangat penting. Bahkan melalui bidang perekonomian, peran santri harus bisa sangat unggul. Hal ini berkaca pada pengalaman santri di masa lampau, di mana santri memiliki andil dalam kemakmuran negeri ini.

"Santri itu harus membawa perbaikan sebagai penjaga tanah air, negara dan bangsa," ujarnya.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, para santri

juga diharapkan mampu memakmurkan perekonomian bangsa dalam berbagai bidang. Dan salah satunya seperti agribisnis ini.

"Saat ini peran santri mulai berkurang dalam pembangunan. Untuk itu ayo para santri bangkit, momentum Hari Santri Nasional kemarin adalah kebangkitan bagi para santri," jelasnya.

Adapun sektor agribisnis yang diharapkan mampu menopang perekonomian bangsa, adalah santri dapat memanfaatkan pertanian, peternakan, pertanian bahkan jika perlu melalui perdagangan.

"Kan bisa santri membuka usaha pertanian, peternakan kalau perlu ada perdagangan. Sehingga perekonomian bangsa ini semakin maju," tambah Wapres.

Usai memberi arahan, Wapres pun langsung membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) ke-VII Kontak Santri Agribisnis Indonesia (Konsain) dengan memukul beduk.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



PEDAGANG PASAR SENAKEN DATANGI DPRD, TANYAKAN PENGUNAAN KIOS BARU

**MENUJU PENETAPAN DCT, TIDAK
ADA PERGANTIAN DARI PARNOL**





RDP dengan pedagang serta OPD terkait

PEDAGANG PASAR SENAKEN DATANGI DPRD, TANYAKAN PENGGUNAAN KIOS BARU

PASER - Sekelompok pedagang di Pasar Induk Penyembolum Senaken mendatangi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser dalam meminta kepastian penggunaan kios baru yang tak kunjung dihuni.

Kedatangan para pedagang itu diterima Komisi III DPRD Kabupaten Paser dan melangsungkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansur menyatakan, pedagang yang berhak menempati kios baru harus memenuhi empat kriteria. Yakni sudah didata, aktif membayar retribusi, punya Hak Guna Pakai (HGP) dan tidak punya tunggakan retribusi.

"Kami sudah minta Pemkab Paser untuk bisa memverifikasi semua pedagang dan harus sesuai perda dan aturan yang ada.

Artinya satu pedagang hanya boleh satu lapak dan tidak boleh lebih," tegasnya.

Basri menegaskan, jika permasalahan ini masih berlarut, ia memastikan DPRD Kabupaten Paser akan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Sehingga ia meminta keseriusan Pemkab Paser untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

"Jangan ada permainan satu pedagang satu, tidak boleh lebih lagi. Sebelumnya ada juga kebijakan bahwa yang memiliki lima lapak, bisa dapat dua lapak, tapi saya tegaskan tidak boleh lebih dari satu," katanya.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Paser, Adi Maulana memastikan bahwa Pemkab Paser pada intinya ingin menata, supaya Pasar Induk Penyembolum Senaken lebih menarik.

"Jika rapi, tertib, tentu banyak orang yang datang, dan yang untung pun juga pedagang,"

katanya.

Dalam penataan pedagang, Pemkab Paser memiliki berbagai regulasi. Namun ia menyadari adanya peraturan ini pasti berdampak pada ragam tanggapan pedagang. Sehingga ia akan mencoba menyesuaikan aturan dengan usulan para pedagang.

"Semisal ada pedagang hanya memenuhi satu, dua atau tiga kriteria, hal demikian lah yang masih dirapatkan oleh tim. Apakah ada pedagang yang tidak memenuhi empat syarat itu, apabila pedagang hanya memenuhi dua syarat bagaimana ini masih kita rapatkan lagi," katanya.

Dalam RDP tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Paser yang hadir, yakni Budi Santo dan Lamaludin. Sementara dari OPD yakni Kasatpol PP Kabupaten Paser, M Guntur, Kepala Disperindagkop UKM Kabupaten Paser, M.Yusuf.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari



Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Paser, Ahyar Rosidi

MENUJU PENETAPAN DCT, TIDAK ADA PERGANTIAN DARI PARPOL

PASER - Proses pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser dipastikan tidak mengalami pergantian.

Pasalnya, menurut Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Paser, Ahyar Rosidi, tidak ada Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mengajukan pada proses verifikasi ini.

"Hingga batas akhir tidak ada satupun partai politik yang mengajukan penggantian Bacaleg DPRD Paser, sehingga KPU Paser akan terus melakukan verifikasi berkas pasca pencermatan DPT," kata Ahyar.

Menurutnya, jika ada penggantian prosesnya sama dengan sebelumnya. Parpol dapat mengganti Bacaleg yang berhalangan tetap dengan persetujuan dari DPP atau sebutan lainnya parpol.

Lanjut dia, penggantian juga dapat dilakukan apabila ada Bacaleg yang ter-

bukti melakukan pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan. Pun dengan kondisi sakit, jika hanya sakit biasa tak akan diakomodir untuk dilaksanakan penggantian.

"Apabila hanya sakit saja tidak bisa diakomodir untuk penggantian. Berdasarkan pasal 75,76 dan 77 PKPU 10 Tahun 2023 bahwa sakit bukan bagian dari berhalangan tetap," tandanya.

Diketahui, selama tahapan pencermatan DPT, terdapat 8 Parpol mengajukan perubahan pada Daftar Calon Tetap (DCT). Ketua KPU Paser, Abdul Qayyim Rasyid menyebut parpol yang mengajukan perubahan adalah Gerindra, PDIP, PPP, PAN, Perindo, Golkar, Demokrat dan Hanura.

"Perubahan yang dimaksud adalah penggantian calon, perubahan nomor urut, pergeseran Dapil (Daerah Pemilihan), dan melengkapi berkas," tutur Qayyim.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

KORAN DIGITAL

radar.
MEDIA

RADAR SAMARINDA

EDISI RABU
25 OKT 2023

AKTUAL & TERPERCAYA

.COM





PEMROV KALTIM GANDENG IPB PETAKAN KAWASAN PENYANGGA IKN

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk melaksanakan program data desa presisi dalam upaya memetakan wilayah Penajam Paser Utara yang menjadi salah satu dari kawasan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menjelaskan pendataan berbasis data desa presisi memiliki peranan penting dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di suatu wilayah.

"Pengumpulan data tersebut mencakup berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sejumlah faktor lainnya yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Desa-desa di Indonesia memiliki potensi, tak terkecuali desa-desa yang berada di Penajam Paser Utara," kata Akmal Malik di Kantor Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Senin.

Akmal Malik mengatakan bahwa secara khusus ada empat desa yang berada di wilayah deliniasi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan dipetakan.

Menurut dia, pendataan tersebut meliputi pelayanan publik, konektivitas, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Dengan pemetaan dan pendataan yang baik,

kata Akmal, pemerintah bisa melihat kondisi terkini desa-desa di Kaltim, khususnya yang berada di sekeliling IKN.

"Kita ingin sarana dan prasarana yang sudah ada di desa-desa di PPU terpetakan by data. Hal ini agar tidak terjadi temuan bahwa ada kawasan yang tidak berkembang dan tertinggal saat gencarnya pembangunan di IKN. Sebab, wilayah-wilayah ini nantinya akan menjadi daerah penunjang sekaligus penyangga berbagai sarana dan prasarana di IKN," ujarnya.

Selain desa di PPU tersebut, Akmal Malik menambahkan bahwa pihaknya juga meminta IPB untuk sekaligus memetakan 37 desa lainnya di Kaltim.

Penjabat Bupati PPU Makmur Marbun menyambut baik dan berkomitmen untuk menyukseskan data desa presisi di Serambi Nusantara.

Layanan publik yang berkualitas, ujarnya, tentu akan berdampak positif terhadap banyak hal, terutama kualitas sumber daya manusia warga Kaltim. Misalnya, layanan kesehatan yang baik dan sektor-sektor penting lainnya. "Mendukung penuh dan tentu akan banyak sekali manfaatnya. Bisa kita aplikasikan ke banyak ranah dan sektor yang menjadi kebutuhan kita. Kesehatan, pendidikan, semuanya, jadi mudah, terorganisir dan membantu kita untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata Makmur. (ANT/MK)

INGIN MODIFIKASI MOTOR? ASTRA MOTOR KALTIM 2 BAGIKAN TIPS #CARI_AMAN

SAMARINDA - Setelah sebelumnya Astra Motor Kaltim 2 sukses menggelar Honda Modif Contest Regional Kalimantan Series pada akhir pekan lalu di kota tepi, Samarinda, kini Astra Motor Kaltim 2 melalui Instruktur Safety Riding Fajrin Nur Huda berikan tips aman bagi masyarakat yang ingin melakukan modifikasi sepeda motor dengan tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan saat berkendara.

Fajrin Nur Huda mengatakan, memodifikasi sepeda motor merupakan hal yang umum dilakukan. Terlebih bagi pecinta modifikasi, mereka biasanya tidak tahan untuk tidak memodifikasi motornya menjadi lebih menarik. Namun, aspek keamanan dan kenyamanan tetap harus diperhatikan.

"Memodifikasi sepeda motor sah-sah saja dilakukan terlebih bagi para pecinta modifikasi sepeda motor karena hal ini mampu meningkatkan kepercayaan diri saat berkendara. Namun, dalam memodifikasi motor, sangat perlu untuk terus mengutamakan aspek keamanan dan kenyamanan dengan ilmu dasar #Cari_Aman," ungkap Fajrin

Lebih lanjut, ia menyampaikan beberapa tips #Cari_Aman yang dapat dilakukan bagi masyarakat yang ingin melakukan modifikasi sepeda motor.

1. Hindari mengubah rangka motor

Salah satu yang paling dilarang oleh polisi adalah motor yang dimodifikasi rangkanya. Nah, jika motor yang kamu gunakan adalah untuk rutinitas sehari-hari hindari mengubah rangka motor tersebut jika tidak ingin dikenakan tilang maupun denda.

Beda cerita jika motor yang kamu rubah rangkanya hanya untuk keperluan pameran atau kontes dan tidak untuk dipakai sewaktu-waktu. Rasanya bebas jika kamu ingin mengekspresikan gayamu lewat modifi-



kasi motor.

2. Jangan mengubah dimensi kendaraan

Selanjutnya, tips modifikasi motor yang dilarang adalah perubahan terhadap dimensi motor. Pastikan wujud motor yang kamu gunakan sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam surat BPKB dan STNK.

Nah, untuk menghindari terkena tilang sewaktu-waktu kamu sebaiknya menghindari modifikasi dimensi motor seperti ukuran panjang, lebar maupun volumenya.

3. Tak perlu mengubah warna motor

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, wujud motor haruslah sesuai dengan yang tercantum di BPKB maupun STNK. Nah, dalam hal ini warna pun juga berlaku. Kamu tidak perlu mengubah warna kendaraan bermotormu jika tidak ingin ditilang.

Tetapi, kamu bisa berkreasi dalam menghias motormu seperti menempelkan stiker. Hanya saja tidak boleh berlebihan. Usahakan warna identitas motor masih terlihat dominan.

Selain itu, jika kamu memang ingin mengubah warna motormu, kamu bisa mengurusnya dengan datang ke kantor Samsat terdekat dengan membawa KTP, STNK dan BPKB dari motor yang ingin diubah warnanya. Surat keterangan dari bengkel yang

melakukan perubahan warna juga kadang diperlukan.

4. Hindari juga mengubah kapasitas mesin

Bagi kamu pengendara motor yang sangat menyukai berada di kecepatan. Mengubah kapasitas mesin motor kesayangan mungkin pernah terlintas di pikiranmu. Sayangnya, hal itu menjadi salah satu yang dilarang untuk dilakukan karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara yang lain.

Ingat, ya, jalanan bukan tempat untuk balapan atau adu kecepatan!

5. Tidak perlu ganti knalpot

Nah, yang satu ini paling banyak dan sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Kamu pasti pernah ketemu motor yang suara knalpotnya berisik dan terkesan mengganggu? Untungnya, modifikasi pada knalpot juga menjadi salah satu yang dilarang oleh Undang-Undang. Sehingga kalau kamu nekat, siap-siap di jalan ditilang sama Pak Polisi!

Alasan kenapa modifikasi knalpot ini dilarang adalah karena berkaitan dengan polusi udara dan suara. Selain itu, tidak semua lho produk knalpot yang dijual di pasaran aman untuk digunakan.

6. Mencopot spion dan lampu sein

Kamu pasti tahukan ya pentingnya keberadaan spion dan lampu sein? Yup, keduanya...



LOGO PEMPROV KALTIM DIGUNAKAN DI MEDSOS, FAISAL KOORDINASI BAWASLU, GALEH: KAMI COBA TAKE DOWN AKUN

SAMARINDA - Beberapa hari terakhir ini, Pemprov Kaltim dikejutkan banyak laporan masuk mengenai penggunaan logo Pemprov Kaltim pada salah satu akun media sosial (medsos).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal, memberikan klarifikasi terkait masalah ini.

Ia menegaskan seharusnya logo pemerintah tidak boleh digunakan, baik secara aturan maupun etika.

"Itu logo brand Pemerintahan ya, jadi aturannya hanya dipakai dan atau untuk kegiatan resmi maupun non resmi tapi yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim, bukan lembaga atau organisasi atau komunitas lain. Apalagi buat kepentingan yang berbau politis, Pemprov Kaltim harus netral," tegas Faisal kepada awak media.

Menurutnya pihaknya, Senin (23/10) malam sudah menyampaikan tweet langsung ke akun tersebut untuk dapat

mengganti logo, namun sampai sekarang belum ditanggapi.

"Staf saya secara resmi melalui akun Diskominfo Kaltim sudah pula mengingatkan dan memberi waktu untuk mengganti logo tersebut namun sampai sekarang tampaknya belum juga ditanggapi," ungkapnya.

"Siang ini kami akan koordinasi langsung dengan Bawaslu Kaltim, KPU dan juga Badan Kesbangpol Kaltim mengenai hal ini," sambungnya.

Terpisah, Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung mengatakan, sudah melakukan penelusuran terkait adanya akun Twitter atas nama Kalimantan Timur yang menggunakan logo Pemprov Kaltim dalam memberikan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ya, kami sudah pastikan bahwa akun itu bukan akun resmi pemerintah. Ini kami masih ingin coba bagaimana mekanisme take down akun," tegasnya. (MK)



MENUJU ERA BARU: OIKN UNGKAP RENCANA BESAR BAGI MASA DEPAN NUSANTARA

SAMARINDA - Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (O IKN) Thomas Umbu Pati TB menyatakan, Nusantara merupakan inovasi IKN menuju peradaban baru sebagai bagian dari upaya mencapai target visi Indonesia 2045, yakni sebagai negara maju.

"Untuk mencapai target visi Indonesia 2045, ada empat yang dilakukan secara bertahap, pertama adalah pembangunan manusia dan kemajuan teknologi, guna menumbuhkan bakat kelas dunia dengan dasar akademik dan digital yang kuat," ujar Thomas Umbu di Samarinda, Selasa.

Kedua, melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui peningkatan produk domestik bruto (PDB) regional Kalimantan Timur hingga tiga kali lipat tahun 2045 melalui diversifikasi ekonomi dan transformasi.

Ketiga, melakukan pemerataan pembangunan dengan mendorong PDB regional Indonesia bagian timur dan memperkuat rantai nilai domestik secara keseluruhan.

Keempat, meningkatkan ketahanan nasional dan tata kelola dengan membentuk standar regulasi baru yang didukung oleh investasi dan inovasi.

Sehari sebelumnya, saat menjadi narasumber dalam Temu Responden 2023 di Samarinda yang digelar oleh Bank Indonesia (BI) Kaltim, ia mengatakan bahwa tahapan di IKN adalah pada 2024 memulai perpindahan sebagian kantor pemerintahan.

Tahun 2025-2029 memperkuat kawasan

inti Nusantara, memperluas area perumahan, kantor, dan zona komersial. Pada 2030-2024 mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan serta industri teknologi tinggi.

Pada 2025-2039 menyelesaikan seluruh infrastruktur dan ekosistem "tiga kota" untuk percepatan pembangunan Kalimantan, dan pada 2040-2045 melakukan pembangunan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua".

Temu Responden 2023 tersebut dihadiri 200 undangan yang terdiri dari instansi vertikal, organisasi pemerintah daerah (OPD), perbankan, serta seluruh korporasi di wilayah kerja BI Kaltim.

Dalam kesempatan itu, Deputi Kepala BI Kaltim Hendik Sudaryanto mengatakan, Bank Indonesia berupaya mengapresiasi keterlibatan para responden dalam memberikan informasi tentang data, survei dan sarana perluasan jejaring.

Dalam hal ini, Kantor Perwakilan BI Kaltim mempunyai tugas untuk memperoleh informasi dan data statistik mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi daerah, yakni dengan cara pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung dan tidak langsung.

"Pada Temu Responden 2023 kali ini mengusung tema 'Menyambut IKN dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang bagi Ekonomi dan Bisnis di Kalimantan Timur', maka kami mengundang OIKN sebagai narasumber," katanya.

Pewarta : M.Ghofar
Editor : Budi Suyanto



PEREMPUAN INI DITANGKAP POLRESTA SAMARINDA, SIMPAN SABU 0,44 GRAM DI DOMPET

SAMARINDA - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan menangkap satu orang pelaku di di Jalan Gatot Subroto Gg. 1, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sekitar Pukul 15.30 Wita.

Kasat Narkoba Polresta Samarinda mengatakan, kronologis pengungkapan pada Kamis (19/10/2023), pelapor dan saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gatot Subroto Gg. 1, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda (tepatnya di dalam Gang), sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu-sabu.

Kemudian pelapor dan saksi melakukan observasi dengan cermat, dan sekitar pukul 15.30 Wita pelapor

dan saksi mencurigai seorang perempuan yang berada di depan rumah.

Setelah dilakukan penggeledahan terhadap perempuan berinisial SN (41), barang bukti yang diamankan 1 buah tas selempang warna putih yang digunakan pelaku yang di dalamnya terdapat 1 buah dompet kecil warna putih yang berisikan 1 paket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 0,44 gram bruto.

Selanjutnya pelaku SN beserta barang buktinya diamankan di Mako Polresta Samarinda guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya Pelaku dijerat pasal 114 ayat (1) subsidier pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



BERAWAL DARI KERIBUTAN, POLSEK SAMARINDA KOTA AMANKAN PELAKU NARKOBA

SAMARINDA – Unit Reskrim Polsek Samarinda Kota berhasil ungkap Kasus Penyalahgunaan atau Peredaran gelap Narkotika di wilayahnya pada Selasa (23/10/2023).

Satu orang pelaku sebagai pemilik barang haram bernama MYS (19) berhasil ditangkap di Jalan Otto Iskandardinata Gg. Al-Wakaf Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Dari pelaku ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu dengan berat 0,15 gram bruto dan 1 bungkus rokok warna hitam dengan merk DT'E.

Kapolsek Samarinda Kota, Kopol Tri Satria Firdaus SIK menerangkan bahwa awal mulai mengungkapkan peredaran gelap narkoba ini berawal Piket SPKT Polsek Samarinda Kota mendapat telpon dari warga bahwa di jalan Otto Iskandardinata Gg. Al-Wakaf ada keributan. Berdasar info dimaksud, Kepala SPK beserta 2 anggota mendatangi TKP tersebut.

Setelah tiba di TKP benar ada seorang pemuda yang telah diamankan oleh warga sekitar beserta ketua RT setempat,

Setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan menemukan 1 bungkus rokok warna hitam dengan merk DT'E yang di dalamnya berisi 1 paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,15 gram.

“Semua barang bukti tersebut kesemuanya diakui milik pelaku. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polsek Samarinda Kota untuk diproses penyidikan dan pengembangan”, jelas Kapolsek.

Terhadap pelaku, Penyidik menjerat dengan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara, pungkasnya. (rls)

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Ali Hamdi

SOROTI SOAL PERUNDUNGAN, KETUA FRAKSI PKS : TUGAS SEMUA PIHAK UNTUK PENCEGAHAN

SAMARINDA - Maraknya kasus bullying atau perundungan ditanggapi serius oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim Ali Hamdi. Menurutnya, perlu langkah pencegahan yang melibatkan semua pihak.

Ali Hamdi menyatakan, bahwa perundungan dapat berdampak serius ke korban. Bahkan, tak sedikit yang berujung pada kematian akibat perundungan. Bagi pelaku juga bisa berakibat buruk mulai dari gangguan mental, merusak karakter dan kecerdasan.

Mengingat banyak kasus yang terjadi dilingkungan

pendidikan, menurutnya, bullying harus dicegah dengan kerjasama semua pihak.

"Lembaga pendidikan harus menjadi lingkungan yang bebas dari perilaku ini, karena bullying bukan hanya tanggung jawab guru saja melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat," terangnya.

Upaya konkret untuk pencegahan perundungan, sebutnya, adalah pendidikan karakter yang dimulai dari lingkungan rumah. Orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak. Pun begitu dengan guru di lingkungan sekolah, harus bisa menjadi

orang tua kedua yang membimbing anak.

Mengingat dampak bullying yang dapat merusak karakter, mental, dan bisa menjadi trauma, pencegahan harus dilakukan sejak dini. Bila tidak maka perilaku perundungan akan menjadi watak hingga dewasa dan merugikan lingkungan sekitar.

"Dengan perbaikan akhlak siswa dan kesadaran kolektif, diharapkan kasus bullying dapat diminimalisir dan akhirnya dihapuskan dari lingkungan pendidikan," tutupnya. (Eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



KOMISI I GELAR RDP BERSAMA ALIANSI MASYARAKAT LOA KULU, BAHAS SOAL ENCLAVE LAHAN

SAMARINDA - Komisi I DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim.

RDP tersebut dilakukan dalam rangka membahas permohonan enclave izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Budi Duta Agro Makmur (BDAM) di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kukar.

Memimpin rapat, Ketua Komisi I, Baharuddin Demmu didampingi Anggota Komisi I diantaranya Harun Al Rasyid, Kaharuddin Jafar, Agus Aras, dan Jahidin.

Baharuddin Demmu mengatakan dalam pertemuan ini dibahas mengenai permintaan masyarakat tentang HGU PT. BDAM untuk di-enclave. "Yang diminta oleh masyarakat itu di surat adalah kurang lebih 280 hektare," sebutnya.

Politisi PAN ini mengatakan bahwa lahan tersebut sudah bisa dikategorikan menjadi lahan terlantar dan pemerintah seharusnya mencabut HGU PT. BDAM supaya bisa dikelola oleh masyarakat.

Ia mengungkap, dari pertemuan tersebut, belum didapatkan titik temu, sehingga Komisi I

akan mengundang kembali manajemen PT. BDAM yang tidak hadir dalam pertemuan untuk bisa memberikan klarifikasi terkait perlakuan perusahaan terhadap masyarakat Loa Kulu.

"Salah satu yang harus mereka klarifikasi adalah apakah mereka juga melakukan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama (PPLB) dengan masyarakat, dan apakah mereka menggunakan lahan itu untuk aktivitas tambang yang diduga melanggar izin HGU mereka," ucap Baharuddin.

Ia menyebut, selama ini masyarakat merasa tidak dihargai oleh pihak PT. BDAM karena bukan masyarakat yang menguasai HGU mereka, namun sebaliknya. Padahal, lanjutnya, masyarakat sudah tinggal di wilayah itu sudah turun temurun sebelum adanya izin PT. BDAM pada tahun 1981.

"Masyarakat juga tidak pernah mendapatkan hak ganti rugi dari perusahaan. Ini menjadi catatan kita di Komisi I, bahwa Budi Duta harus dipanggil kembali untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan di wilayah izin HGU mereka," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Komisi I berencana akan melakukan kunjungan lapangan dalam waktu

dekat ini untuk mengecek secara langsung terhadap kondisi lahan dan masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Kemudian ia menegaskan, apabila masyarakat tidak punya sertifikat, maka pemerintah harus membantu untuk dibuatkan sertifikat secara gratis. Dan untuk menjadi perhatian, bahwa masyarakat tinggal di sana turun temurun serta berhak atas tanah itu.

"Saya tidak perlu bicara sertifikat untuk masyarakat. Ya kalau masyarakat tidak punya sertifikat tanah, maka itu kewajiban pemerintah untuk menerbitkan sertifikat gratis," tandasnya.

Selanjutnya, ia menyambut baik atas kebijakan Kementerian ATR/BPN bahwa perubahan status tanah dari HGU menjadi SHM itu gratis dan tidak dikenakan biaya. Namun ia menyayangkan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terhambat karena banyak lahan masyarakat yang sudah ada izin HGU.

"Bahkan ada beberapa lahan masyarakat yang sudah bersertifikat, itu ditindih atau berlapis oleh HGU," pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh

FITRI MAISYAROH SEBUT PENTINGNYA EDUKASI PRANIKAH UNTUK MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA

SAMARINDA - Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, edukasi pranikah perlu dilakukan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh menilai, edukasi pranikah merupakan bentuk persiapan yang tak boleh disepelekan. Ada beberapa aspek penting sebutnya, yang acap kali luput disiapkan sebelum menikah. Salah satunya mengenai parenting atau pola asuh anak.

Tak sedikit sebutnya, pasangan yang terjebak dalam memikirkan pernikahan dan pasca nikah saja. Sementara aspek parenting luput untuk dilakukan sebagai persiapan.

"Keinginan untuk menikmati bulan madu, bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan berkunjung ke keluarga besar seringkali menga-

lahkan keinginan untuk belajar parenting," jelasnya kepada media ini.

Padahal menurutnya, parenting bagaikan investasi. Sangat penting agar dapat membantu pasangan menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam perjalanan menjadi orang tua.

Ilmu pola asuh anak terang Politi-si PKS ini bisa membantu pasangan mengerti merawat, mendidik, membimbing anak. Bahkan dapat berguna saat masih dalam masa kehamilan. Parenting juga, membuat pasangan memiliki kesepakatan terkait pola asuh anak.

"Memahami ilmu parenting sebelum menikah adalah langkah bijak untuk memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dengan baik. Tidak kalah penting adalah pondasi utama dalam pernikahan adalah agama," pungkasnya.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Jahidin

JAHIDIN HARAP MASYARAKAT KALTIM TERUS JAGA KONDUSIVITAS PEMILU 2024

SAMARINDA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Jahidin, berharap seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas Pemilu 2024.

Menurutnya, jelang pesta demokrasi lima tahunan tersebut, akan banyak narasi yang menyudutkan salah satu pihak. Ia berharap masyarakat menyaring sumber informasi dan tidak mudah terhasut.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas daerah menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang,” ujar Pria dengan latar belakang advokat ini.

Suksesnya Pemilu mendatang, ujar Ketua PKB Samarinda ini, tidak hanya bergantung

kepada penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu saja.

Jahidin menilai, bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki peran untuk kesuksesan Pemilu 2024 nanti, mulai dari menjaga kondusivitas sebelum pemilu, menaikan partisipasi pemilih, dan keamanan pasca pemilu serta beberapa hal penting lainnya.

Yang jelas menurutnya, Kaltim adalah daerah yang aman dan tentram, dan harus terus terjaga kondusivitasnya meskipun dihuni oleh masyarakat yang majemuk.

“Saat ini kita masih kondusif, hal ini yang harus kita pertahankan bersama,” pungkasnya. (Eky/Adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Udin

M. UDIN DORONG ALOKASI CSR UNTUK RUMAH LAYAK HUNI

SAMARINDA - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Udin mendorong perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim, menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program Rumah Layak Huni (RLH).

Menurut Politisi Golkar ini, persoalan pemukiman yang tidak layak masih sering ditemui di Bumi Etam. Mengingat banyaknya perusahaan tambang batu bara di Kaltim, ia mendorong para perusahaan tambang tersebut untuk peduli terhadap persoalan pemukiman.

"Saya melihat masih banyak masyarakat di pelosok-pelosok Kalimantan Timur yang masih tinggal di pemukiman yang tidak layak," jelasnya kepada awak media, Selasa (24/10/2023).

Udin menilai, semestinya para perusahaan tersebut tak hanya meny-

alurkan CSR pada area ring 1 mereka saja, namun melihat Kaltim secara utuh. Ia juga mendorong alokasi dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kalau kinerja penyaluran RLH tahun kemarin sudah baik, maka perlu ditingkatkan lagi. Namun perlu dievaluasi bersama agar penyalurannya merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Legislator yang pernah menjabat Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, perusahaan tambang semestinya tak hanya menyalurkan CSR untuk hal seremonial saja. Selain untuk RLH, CSR sebutnya juga dapat dialokasikan untuk persoalan infrastruktur dan fasilitas kesehatan di Kaltim.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati

PUJI SETYOWATI INGATKAN BAHAYA JUDI ONLINE

SAMARINDA - Menjamurnya praktek judi online membuat Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati prihatin. Ia pun mengingatkan kepada masyarakat Kaltim untuk menghindari judi online.

Puji menerangkan, masyarakat yang terhimpit persoalan ekonomi, akan mencari cara cepat untuk melipat gandakan uangnya melalui judi.

Dengan perkembangan teknologi, situs judi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan, sebanyak 2,76 juta masyarakat Indonesia menjadi partisipan dalam permainan judi online.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,19 juta masyarakat merupakan golongan warga berpenghasilan rendah.

Melihat hal ini, menurut Puji sangat sulit untuk memberantas perkembangan judi yang sudah via online tersebut. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir atau menghapus 425.506 konten terkait judi online selama tiga bulan terakhir tepatnya sejak 18 Juli 2023.

Menurut Puji salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memberikan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya judi online. Musabab, dampak dari candu judi online dapat merusak kejiwaan seseorang.

"Banyak kasus akibat kecanduan judi online sangat mempengaruhi mental dan psikis seseorang. Dampak depresi dan stres kalau sering kalah main sudah pasti, belum kalau modal habis harus cari banyak cara agar dapat modal," jelasnya.

Politisi Demokrat ini lebih lanjut menerangkan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online, butuh sinergitas dari semua pihak untuk memberikan edukasi.

"Kami meminta tenaga pendidikan dan tokoh agama beserta orangtua saling bersinergi dalam memberikan pemahaman dan pengawasan secara terus menerus agar tidak menjadi korban judi online," tegasnya. (Eky/adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



RDP Komisi IV DPRD Kaltim

KELUHKAN SOAL PEMBAYARAN UPAH LEMBUR, SERIKAT PEKERJA "NGADU" KE KOMISI IV

SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kaltim yang dipimpin oleh Akhmed Reza Fachlevi menerima sejumlah pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kebangsaan Kaltim di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim.

Serikat pekerja yang bekerja pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran tersebut mengeluhkan persoalan hak berupa uang lembur yang belum dibayarkan sejak tahun 2013 sampai 2018.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi, BPJS Samarinda dan Pengawas Tenaga Kerja.

Akhmed Reza Fachlevi menjelaskan, tunggakan yang belum terbayarkan oleh pihak perusahaan dari tahun 2013 sampai 2018 totalnya sebesar Rp 7,4 miliar. Namun sebagian dari nilai tersebut telah ada itikad baik dari pihak perusahaan dengan melaku-

kan pembayaran sebagian sehingga kekurangannya tersisa Rp 5,2 miliar.

"Kita berharap permasalahan yang ada dapat diselesaikan oleh perusahaan karena mengingat hal itu merupakan bagian dari hak para pekerja," ujar politisi partai Gerindra ini belum lama ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan pengawalan terhadap persoalan yang dikeluhkan oleh para tenaga kerja dengan meminta Disnakertrans Kaltim dapat membantu mengakomodir masalah tersebut sampai tunggakan oleh perusahaan dapat dibayarkan.

"Kita sudah meminta kepada Disnakertrans Kaltim untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas," ujarnya.

Dari persoalan terkait tunggakan tersebut, pihak perusahaan mengakui bahwa para tenaga kerja yang belum dibayar upah lemburnya, lantaran berada di serikat pekerja yang berbeda. Walau demikian, bagi Reza, itu bu-

kan sebagai alasan yang bisa diterima untuk tidak menjalankan kewajiban terkait pembayaran upah lembur.

"Dari persoalan yang ada, kami juga meminta kepada Disnakertrans Kaltim untuk melakukan pendataan serikat pekerja di Kaltim supaya menghindari kejadian serupa terulang kembali," tandasnya.

Reza mengatakan, dari informasi yang diterimanya, beberapa pekerja atau buruh sudah terbayarkan, namun ada beberapa kendala karena pada saat masuk melamar kerja ada yang menggunakan organisasi serikat pekerja yang lain.

"Sebanyak tiga organisasi serikat pekerja yang mereka pakai untuk masuk kerja, namun ini susah juga. Walaupun tidak ada larangan untuk mengikuti serikat kerja manapun. Kami tetap mengimbuu agar ikut serikat kerja sesuai dengan ketentuan pemerintah," pungkasnya. (Adv/dprd-kaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Romadhony Putra Pratama

ROMADHONY BERI APRESIASI PEMPROV KALTIM TERKAIT REALISASI PROGRAM RLH

SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kaltim Romadhony Putra Pratama mengapresiasi Pemprov Kaltim, terkait realisasi program Rumah Layak Huni (RLH).

Menurut legislator termuda DPRD Kaltim ini, program tersebut sedikit banyak membantu masyarakat prasejahtera.

"Saya mengapresiasi itu, sangat membantu warga prasejahtera Kaltim, khususnya warga Samarinda mendapatkan manfaatnya," jelasnya belum lama ini.

Apalagi sebutnya, program tersebut menggandeng perusahaan swasta yang ada di Kaltim. Melibatkan perusahaan dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR), sebut Dhony patut diacungi jempol.

Ia meminta agar CSR dapat menyasar hal lain yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kaltim.

"Kami selalu suarakan, jangan sampai perusahaan tidak membangun daerahnya," tegasnya.

Sebagai informasi hingga akhir 2022, realisasi pembangunan RLH ini telah mencapai 77,82 persen, dengan rincian akumulatif sejak 2019 hingga 2022 telah dilakukan rehabilitasi sebanyak 19.151 unit rumah, 172 rumah susun (rusun) dan pembangunan 131 RLH. Pemprov Kaltim sendiri, menargetkan 25 ribu RLH untuk keluarga pra sejahtera di Kaltim hingga tahun 2023.(eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin

PEMANFAATAN HOTEL ATLET, SALEHUDDIN: WACANA SEJAK 2016, TAK ADA TINDAK LANJUT

SAMARINDA - Satu dari sekian banyak aset "tidur" milik Provinsi Kaltim yakni Hotel Atlet, terus didesak oleh DPRD Kaltim pemanfaatannya. Bukan tanpa sebab, Hotel yang dibangun untuk penyelenggaraan PON 2008, tak terawat dibiarkan terbengkalai.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Salehuddin, mempertanyakan alasan Pemprov tak memanfaatkan gedung tersebut untuk fungsi yang lain.

Dugaannya, ada ketidakseriusan dan tidak konsisten pemerintah provinsi, terutama dalam hal pemanfaatan Hotel Atlet. Sebab, semenjak PON 2008 berakhir, gedung tersebut tak dialihkan fungsinya untuk kegunaan lain.

"Pemanfaatan Hotel Atlet sudah lama menjadi wacana, sejak 2016. Tapi sampai sekarang, belum ada tindak lanjut yang konkret," tegas Salehuddin.

"Jangan sampai kita pandai membangun tapi tidak pandai merawat atau memberikan manfaat dari bangunan

yang kita bangun," sambungnya.

Padahal, menurut Politisi Golkar ini, Hotel Atlet dapat dimanfaatkan untuk hal lain, mulai dari perkantoran, pusat pelayanan publik hingga jadi wadah usaha para pelaku UMKM.

"Sayang kalau dibiarkan saja. Sekarang kondisinya sudah miris, banyak peralatan yang tidak berfungsi atau hilang," ungkapnya.

Salehuddin menganggap, memanfaatkan aset daerah yang terbengkalai, berpotensi untuk menambah pundi-pundi PAD. Tak hanya itu, masyarakat juga akan merasakan dampaknya karena memiliki fasilitas yang memiliki kegunaan.

"Kalau Hotel Atlet itu harus punya nilai ekonomi dan sosial dengan dimanfaatkan lagi. Banyak aktivitas pemuda dan olahraga di sana," tandasnya. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Antrean panjang di salah satu SPBU di Kaltim (Dok)

LEGISLATOR DAPIL BALIKPAPAN SOROTI ANTREAN BBM DI KALTIM

SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur Mimi Meriami BR Pane, menyoroti antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah Kabupaten/Kota di Kaltim.

Mimi mengungkapkan, beberapa SPBU masih terlihat antrean panjang. Padahal Kaltim merupakan salah satu provinsi penghasil minyak dan gas bumi (migas). Ironinya Kaltim, masih saja tak mendapat suplai yang cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat.

"Berbagai wilayah Kalimantan Timur, beberapa SPBU masih sering terjadi antrean panjang," ungkap Politisi PPP ini, Selasa (24/10/2023).

Semisal di Dapilnya, yakni Kota Balikpapan.

Meskipun perusahaan plat merah sektor migas beroperasi di sana, tak menjadi garansi bahwa kebutuhan BBM di Kota Beriman selalu terpenuhi. Justru sebaliknya, antrean panjang di beberapa SPBU, sering ditemuinya.

"Masih sering terlihat antrean panjang di kota Balikpapan yang terkenal sebagai kota minyak," bebarnya.

Untuk itu ia mendorong pemerintah menyikapi persoalan BBM di Bumi Etam. Menurutnya kebutuhan BBM tak boleh diacuhkan oleh pemerintah pusat, mengingat mobilisasi masyarakat yang terus meningkat setiap harinya. (Eky/Adv/DPRD Kaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari



Ketua Komisi I DPRD Kaltim Yusuf Mustofa

YUSUF MUSTAFA APRESIASI KESIAPSIAGAAN POLDA KALTIM JELANG PENGAMANAN PEMILU 2024

BALIKPAPAN - Pekan lalu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf Mustofa, hadir dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Mahakam 2023-2024, di Balikpapan.

Yusuf yang mewakili pimpinan DPRD Kaltim, mengatakan bahwa DPRD Kalimantan Timur mendukung penuh, pelaksanaan Pemilu 2024 di Benua Etam berjalan khidmat dengan menjaga persatuan dan kekompakan.

Ia pun memberikan apresiasi melihat kesiapsiagaan personel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Imam Sugianto jelang pengamanan Pemilu 2024.

"Sebagai anggota legislatif hanya

memonitor, yang jelas kami memberikan dukungan dalam rangka menjelang pemilu. Harus kompak dan ber-satu", ucapnya.

Politisi Golkar ini berharap, Pemilu 2024 dapat berlangsung kondusif. Dengan saling bahu-membahu, saling kompak dalam mendukung serta mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai.

Turut hadir peserta apel meliputi FKPD TK I, Pejabat Polda serta stake holder lainnya. Kemudian, Apel ditutup dengan penyematan pita oleh Kapolda Kaltim kepada tiga perwakilan personil. (Eky/Adv/dprdkaltim)

Pewarta : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

GK Grand Kartika
HOTEL

OK!
TOBER

Deluxe Room

ONLY

Rp ~~698.000,-~~

30% OFF

Rp 488rb

NETT/NIGHT

benefits

Breakfast
2 pax



FREE

Laundry
Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2



FREE

**Afternoon
Tea**



FREE

Mini Mantou
5 pcs



BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com